



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
Telepon (0728) 21106, 21117 Faks. (0728) 21106

Liwa, 14 Februari 2022

Kepada Yth.

Nomor : 900/68/IV.01/2022
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja
Tahun 2021

Bapak Bupati Lampung Barat
melalui Kepala Bagian Organisasi
Setdakab Lampung Barat
Di – Liwa

Menindaklanjuti Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 060/55/09/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal Penyampaian Laporan Kinerja 2021, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021, hasil unduhan Laporan Kinerja Tahun 2021 yang telah diunggah di aplikasi e-SAKIP Kabupaten Lampung Barat pada alamat website saktiberkibar.lampungbaratkab.go.id.

Demikian disampaikan, terima kasih.

22 2022
02 Ely

ms
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, *l*

Ir. OKMAL, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641005 199403 1 003

**LAPORAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, BPKD Kabupaten Lampung Barat telah memiliki dokumen perencanaan jangka menengah sebagai kerangka acuan kerja, yang kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan, dan dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja BPKD Kabupaten Lampung Barat ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan BPKD Kabupaten Lampung Barat dalam rangka membantu mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat, sekaligus mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan SKPD dalam mengemban tugas dan mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Laporan Kinerja BPKD Kabupaten Lampung Barat ini disusun dengan memperhatikan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Demikianlah pengantar kami, semoga dokumen ini dapat bermanfaat.

Liwa, Februari 2022

ms
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, e

Ir. OKMAL, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641005 199403 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia, setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, Rencana Kinerja Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat atas penyelenggaraan program dan kegiatan pada Tahun 2020, yang dapat menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan Kinerja ini disusun dengan menyajikan hasil Pengukuran Kinerja yang merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan pada Tahun 2021. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Sesuai dengan tugas yang diembannya dan dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat memiliki 1 (satu) Tujuan, 1 (satu) Sasaran Strategis serta 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Tahun 2017-2022, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut.

**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017	100	100	100	100	100
			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah	3	3	3	-	-
			Persentase peningkatan PAD	3	3	3	3	3

Secara umum, pada Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Analisis Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2021
Terhadap Tahun Sebelumnya dan Terhadap Target Akhir Renstra**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		%	Target Akhir Renstra	Capaian s.d. Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra (%)
						Target	Realisasi			
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
2	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase peningkatan PAD	%	4,47	28,24	2,46	3	3,36	112	15	256,87

Sebagaimana terlihat pada Tabel di atas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2021. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (Renstra), maka terlihat bahwa pada Tahun 2021 seluruh target yang telah ditetapkan tercapai, bahkan ada yang melampaui target.

Capaian kinerja 3 indikator sasaran sebagaimana ditampilkan pada Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator 1 "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" dengan target WTP dapat terealisasi (100 %). Kabupaten Lampung Barat dapat mencapai target berupa Opini WTP atas LKPD Tahun 2020 pada Triwulan II 2021. Hal ini berarti indikator ini sudah optimal memenuhi target kinerja, sehingga untuk tahun berikutnya tetap dilakukan upaya-upaya sebagaimana telah dilakukan selama ini, namun akan terus dilakukan evaluasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang mendukung indikator pertama ini, mengingat tantangan untuk terus mempertahankan Opini WTP akan semakin berat, karena aturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis, dan standar penilaian atas LKPD dari Auditor yang semakin sulit.

Indikator 2 "Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017" dengan target 100% dapat terealisasi 100 %. Hal ini berarti indikator ini sudah optimal memenuhi target kinerja, sehingga untuk tahun berikutnya tetap dilakukan upaya-upaya sebagaimana telah dilakukan selama ini, namun akan terus dilakukan evaluasi berkaitan dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung indikator kedua ini, mengingat aturan mengenai pengelolaan barang milik daerah yang sangat dinamis, serta peran yang dimiliki indikator kedua ini yang juga dalam rangka mendukung pencapaian indikator pertama, yaitu mempertahankan Opini WTP.

Indikator 3 "Persentase peningkatan PAD" dengan target 3 %, realisasi sebesar 3,36 % (tingkat capaian kinerja sebesar 112 %). Perbandingan PAD untuk Tahun Anggaran 2021 terhadap anggaran tahun 2020 (anggaran yang dipakai adalah anggaran APBDP) adalah sebagai berikut :

1. Target PAD TA. 2020 adalah sebesar Rp. 65.771.303.679,74.
2. Target PAD TA. 2021 adalah sebesar Rp. 67.978.328.317,00.
3. Target PAD meningkat sebesar Rp. 2.207.024.637,26 (3,36%).

Capaian indikator kinerja Persentase peningkatan PAD pada tahun 2021 dapat melampaui target yang telah ditetapkan, dan jika dibandingkan dengan target Renstra, indikator kinerja ini pun dapat melampaui target. Akan tetapi ke depannya, pencapaian target peningkatan PAD memiliki tantangan. Saat ini, Potensi PAD belum tergali dan terkelola dengan optimal. Target peningkatan PAD pun akan sulit tercapai akibat pandemi Covid-19 yang belum usai, yang mengharuskan diambilnya kebijakan pemberian stimulus Pajak dan Retribusi Daerah, ataupun

akibat kondisi *force majeure* lain yang tidak dapat diprediksi ke depannya. Untuk itu, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi hal tersebut, antara lain dengan melakukan pendataan potensi PAD sebagai langkah awal eksplorasi potensi PAD, serta melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kontribusi, dukungan dan kerja sama berbagai pihak di lingkungan internal BPKD serta seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Lampung Barat, yang dapat bersinergi dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi.

Liwa, Februari 2022

ms. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, e

Ir. OKMAL, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641005 199403 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	I - 2
1.3 Tugas dan Fungsi	I - 4
1.4 Isu Strategis	I - 6
1.5 Landasan Hukum.....	I - 7
1.6 Sistematika.....	I - 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II - 1
2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	II - 1
1. Rencana Strategis.....	II - 1
2. Indikator Kinerja Utama.....	II - 4
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	II - 6
2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu.....	II - 7
1. Rencana Strategis Hasil Reviu	II - 7
2. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu	II - 9
3. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu.....	II - 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III - 1
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	III - 1
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	III - 3
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran	III - 5
3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III - 16
3.5 Faktor Pendukung Keberhasilan, Permasalahan, dan Solusi	III - 20
3.6 Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan	III - 21
3.7 Inovasi dan Prestasi yang Diraih Perangkat Daerah	III - 26
BAB IV PENUTUP	IV - 1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja.....	II - 3
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama.....	II - 4
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja	II - 6
Tabel 2.4. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu	II - 8
Tabel 2.5. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu	II - 10
Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu.....	II - 13
Tabel 3.1. Skala Pengukuran Ordinal	III - 2
Tabel 3.2. Skala Predikat Capaian Kinerja Pendekatan Permendagri No. 54....	III - 2
Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama	III - 4
Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja.....	III - 6
Tabel 3.5. Pencapaian Kinerja Sasaran	III - 6
Tabel 3.6. Pencapaian Target Misi	III - 7
Tabel 3.7. Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	III - 7
Tabel 3.8. Evaluasi Pencapaian Sasaran	III - 8
Tabel 3.9. Analisis Pencapaian Sasaran	III - 10
Tabel 3.10. Data Dukung Capaian Indikator Sasaran 1	III - 11
Tabel 3.11. Data Dukung Capaian Indikator Sasaran 2.....	III - 12
Tabel 3.12. Data Dukung Capaian Indikator Sasaran 3.....	III - 12
Tabel 3.13. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 Terhadap Tahun 2020	III - 13
Tabel 3.14. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 Terhadap Target Akhir.....	III - 15
Tabel 3.15. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III - 19

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPKD	I - 5
Gambar 3.1. Target dan Realisasi IKU	III - 5
Gambar 3.2. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	III - 14
Gambar 3.3. Persentase Peningkatan PAD	III - 14
Gambar 3.4. Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra	III - 16
Gambar 3.5. Kebutuhan Pegawai	III - 17
Gambar 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran.....	III - 19
Gambar 3.7. Tujuan, Sasaran, dan Program.....	III - 21
Gambar 3.8. Bupati Lampung Barat Menerima Penghargaan Opini WTP	III - 27



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi OPD sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan



Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja serta lebih jauh pencapaian visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama, dan sasaran, terhadap target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Potensi Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai BPKD Kabupaten Lampung Barat adalah 45 orang.

b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan Ruang

Jumlah Pegawai BPKD menurut Golongan Ruang :

- 1) Pegawai Golongan IV : 8 orang
- 2) Pegawai Golongan III : 31 orang
- 3) Pegawai Golongan II : 6 orang

c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPKD berdasarkan latar belakang pendidikan adalah :

- 1) Sarjana Strata 2 (S2) : 12 orang
- 2) Sarjana Strata 1 (S1) : 25 orang
- 3) D III : 3 orang
- 4) Paket C : 1 orang
- 5) SLTA sederajat : 4 orang



d. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Diklat Penjurangan Struktural Tertinggi

Jumlah (PNS) berdasarkan Diklat Penjurangan Struktural Tertinggi adalah :

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1) Golongan IV/c | : 1 Orang (Diklat Pim. II) |
| 2) Golongan IV/b | : 1 Orang (Diklat Pim. III) |
| 3) Golongan IV/a | : 2 Orang (Diklat Pim. III) |
| 4) Golongan IV/a | : 4 Orang (Diklat Pim. IV) |
| 5) Golongan III/d | : 9 Orang (Diklat Pim. IV) |
| 6) Golongan III/c | : 1 Orang (Diklat Pim. IV) |

2. Sarana dan Prasarana

a. Mesin dan peralatan :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) Alat berat | : 2 unit |
| 2) Kendaraan roda empat | : 6 unit |
| 3) Kendaraan roda dua | : 22 unit |
| 4) Alat bengkel | : 3 unit |
| 5) Alat ukur | : 2 unit |
| 6) Alat kantor & rumah tangga | : 1.488 buah |
| 7) Alat pertanian | : 1 buah |
| 8) Alat studio dan komunikasi | : 28 unit |

b. Gedung dan bangunan :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1) Bangunan gedung | : 647 m ² |
| 2) Bangunan monumen | : 276 buah |

c. Jalan, jembatan, bangunan air, jaringan dan instalasi :

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1) Jaringan/instalasi | : 2 unit |
|-----------------------|----------|

d. Aset tetap lainnya :

- | | |
|---------|-----------|
| 1) Buku | : 1 paket |
|---------|-----------|

e. Aset tak berwujud : 21 unit

f. Aset lain-lain : 318 buah



1.3 Tugas dan Fungsi

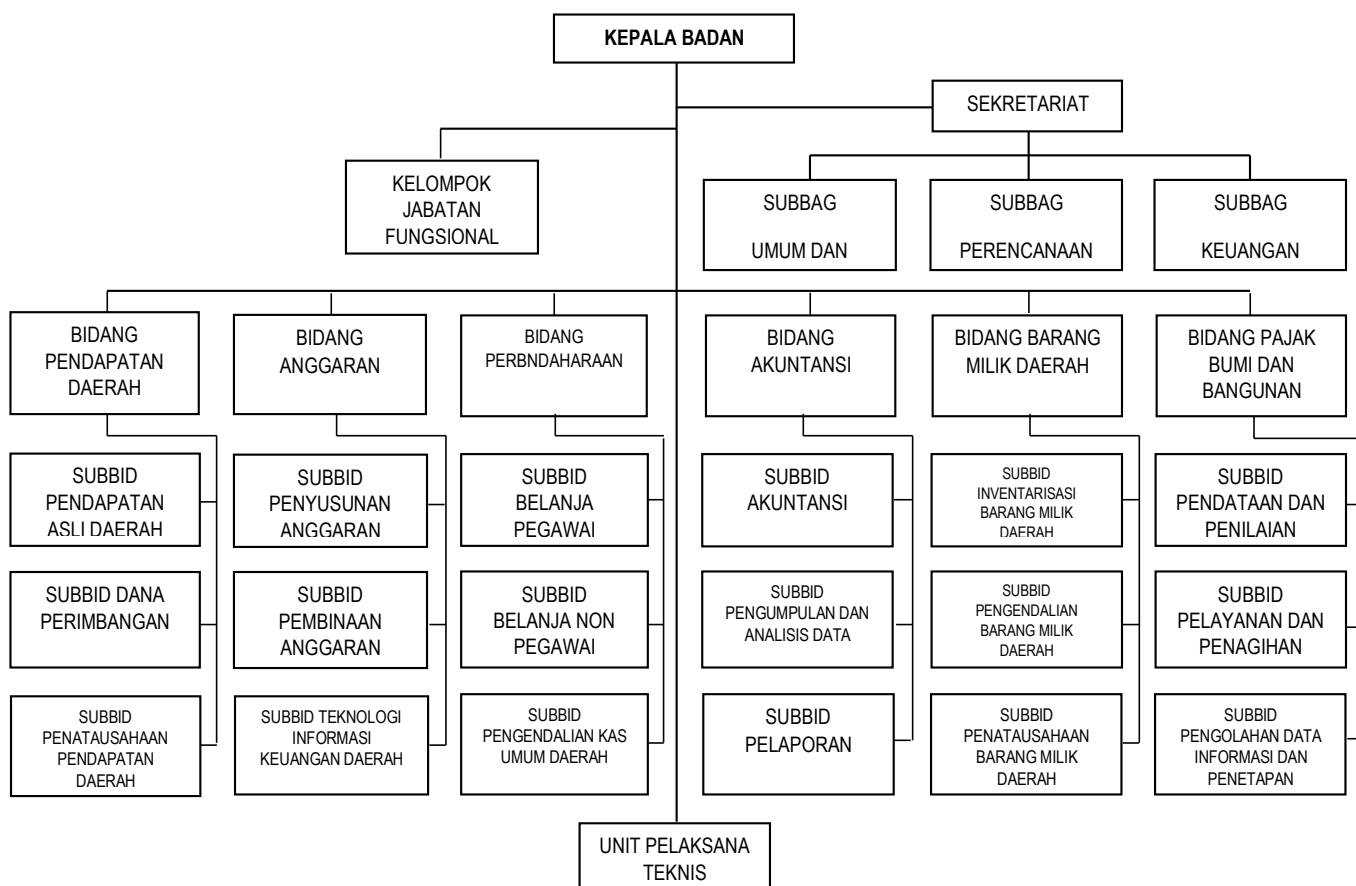
Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi di bawah ini :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Lampung Barat



1.4 Isu Strategis

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat dibentuk dalam rangka membantu Bupati dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan OPD lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan tugas dan fungsinya serta penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dihadapkan pada isu strategis yang membutuhkan pemecahan.

Adapun isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya PAD yang mengindikasikan rendahnya kemandirian daerah terhadap pusat. Hal ini disebabkan oleh belum tergali dan terkelolanya potensi daerah secara optimal sebagai sumber PAD. Kondisi geografis Lampung Barat yang relatif luas, adanya daerah-daerah yang sulit terjangkau, serta wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor, mempengaruhi kepercayaan investor dalam membantu menggali dan mengelola potensi daerah.
- b. Pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, di tengah era sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi. Saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah memiliki berbagai aplikasi yang terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan, yang menjadikan pekerjaan lebih efektif, mudah diakses, dan *up to date*, serta dalam rangka menyederhanakan dan mengotomatisasi proses kerja.
- c. Pemantapan pengelolaan keuangan daerah, mengingat Kabupaten Lampung Barat selama 11 tahun berturut-turut meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Prestasi ini selain merupakan capaian daerah yang patut diapresiasi, juga menjadi tantangan bagi seluruh perangkat daerah di bawah koordinasi BPKD untuk terus memantapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi, karena ke depannya



tantangan akan semakin berat, selain bahwa mempertahankan sebuah prestasi lebih sulit dibandingkan meraihnya.

- d. Pengelolaan Barang Milik Daerah berbasis sistem informasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Potensi penurunan Pendapatan Daerah akibat penurunan target PAD dan pengurangan Dana Transfer ke daerah sebagai dampak Pandemi Covid-19 ataupun kondisi *force majeure* lain yang tidak dapat diprediksi ke depannya.

1.5 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).



1.6 Sistematika

LKIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran Kinerja, Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, yang sekaligus menetapkan Rencana Strategis OPD Tahun 2017-2022, termasuk Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatan Kepala Daerah yang terpilih, agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi akuntabel.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.



Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD dan Forum SKPD, sehingga Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

a. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat akan berupaya mewujudkan Visi Kepala Daerah Tahun 2017-2022 yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat Hebat dan Sejahtera”.

Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Lampung Barat dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Lampung Barat yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

b. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 mengemban Misi yaitu :

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik”.



c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istandi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2017-2022 sebanyak 1 sasaran strategis.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan Tujuan, Sasaran berikut indikator dan target Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017	100	100	100	100	100
			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah	3	3	3	-	-
			Persentase peningkatan PAD	3	3	3	3	3



2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, diterbitkanlah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 36 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022, dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala OPD masing-masing.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung saat ini menjadi salah satu indikator untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang penilaiannya mencakup proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan atas perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.	Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, meliputi : 1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan. 2. Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern. 3. Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	Penilaian/audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban/pelaporan, dengan hasil audit berupa Predikat Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah 11 kali secara berturut-turut memperoleh Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan berupaya terus mempertahankannya.



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
		Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017	%	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diatur di dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan diturunkan ke dalam Perbup Nomor 5 Tahun 2017, menjadi salah satu acuan dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah, di mana pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi salah satu komponen pengelolaan keuangan daerah.	Ada 11 variabel, dengan formula : Jumlah variabel yang dipenuhi dibagi 11 dikali 100%	11 variabel yang harus dipenuhi untuk mengukur kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. RK BMD (Pengadaan/Pemeliharaan) 2. Standar Satuan Harga/Standar Kebutuhan 3. Pengadaan BMD 4. Inventarisasi BMD 5. Pemeliharaan dan Pengamanan 6. Pengawasan/Pengendalian/Pembinaan 7. Pemanfaatan 8. Penggunaan 9. Penilaian 10. Penghapusan 11. Penatausahaan
		Persentase peningkatan PAD	%	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu komponen Pendapatan Daerah. Rasio total PAD terhadap total Pendapatan Daerah menunjukkan tingkat kemandirian daerah terhadap Pemerintah Pusat. Semakin tinggi nilai rasio, berarti semakin tinggi tingkat kemandirian daerah. Saat ini total PAD Kabupaten Lampung Barat baru menyumbang 4 hingga 6 persen terhadap total Pendapatan Daerah, yang menunjukkan Kabupaten Lampung Barat masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat. Untuk itu, pemerintah terus menargetkan peningkatan PAD setiap tahun, melalui ekstensifikasi dan intensifikasi PAD.	Jumlah Anggaran PAD tahun ini dikurangi Jumlah Anggaran PAD tahun lalu dibagi Jumlah Anggaran PAD tahun lalu dikali 100%	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menargetkan peningkatan PAD sebesar 3% setiap tahun, yang dihitung dari anggaran PAD di dalam APBD setiap tahunnya.



3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, dan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
		Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017	100 %
		Persentase peningkatan PAD	3 %



2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan, dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD, dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :

- a. Pada Cascading Kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Indikator Kinerja Persentase peningkatan Pendapatan Daerah dan Persentase peningkatan PAD, didukung oleh 1 (satu) Program, yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Hal ini tidak tepat, karena 1 (satu) Program tidak dapat mendukung pencapaian lebih dari 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran. Karena nomenklatur dan jumlah Program telah ditentukan di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, dimana tidak dimungkinkan menambah nomenklatur dan jumlah Program, maka direkomendasikan untuk mengurangi/menghapus Indikator Kinerja Sasaran.



- b. Mengingat selama beberapa tahun terakhir capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah tidak pernah mencapai target kinerja, bahkan mencapai minus, yang diakibatkan oleh faktor eksternal di luar kendali Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, salah satunya akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan Pemerintah Pusat mengambil kebijakan Refocussing Anggaran, salah satunya dengan mengurangi pagu DAU untuk Provinsi/Kabupaten yang menjadi salah satu komponen yang signifikan di dalam pos Pendapatan Daerah, maka Indikator Kinerja tersebut yang direkomendasikan untuk dihapus.

Hasil reviu dan tindak lanjut perbaikan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021 tersebut selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017	%	100	100	100	100	100
			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah	%	3	3	3	-	-
			Persentase peningkatan PAD	%	3	3	3	3	3



2. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu Rencana Strategis, juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung saat ini menjadi salah satu indikator untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang penilaiannya mencakup proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan atas perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.	Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, meliputi : 1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan. 2. Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern. 3. Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.		Penilaian/audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban/ pelaporan, dengan hasil audit berupa Predikat Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah 11 kali secara berturut-turut memperoleh Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan berupaya terus mempertahankannya.



Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
		Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017	%	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diatur di dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan diturunkan ke dalam Perbup Nomor 5 Tahun 2017, menjadi salah satu acuan dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah, di mana pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi salah satu komponen pengelolaan keuangan daerah.	Ada 11 variabel, dengan formula : Jumlah variabel yang dipenuhi dibagi 11 dikali 100%		11 variabel yang harus dipenuhi untuk mengukur kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. RK BMD (Pengadaan/Pemeliharaan) 2. Standar Satuan Harga/Standar Kebutuhan 3. Pengadaan BMD 4. Inventarisasi BMD 5. Pemeliharaan dan Pengamanan 6. Pengawasan/Pengendalian/ Pembinaan 7. Pemanfaatan 8. Penggunaan 9. Penilaian 10. Penghapusan 11. Penatausahaan



Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
		Persentase peningkatan PAD	%	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu komponen Pendapatan Daerah. Rasio total PAD terhadap total Pendapatan Daerah menunjukkan tingkat kemandirian daerah terhadap Pemerintah Pusat. Semakin tinggi nilai rasio, berarti semakin tinggi tingkat kemandirian daerah. Saat ini total PAD Kabupaten Lampung Barat baru menyumbang 4 hingga 6 persen terhadap total Pendapatan Daerah, yang menunjukkan Kabupaten Lampung Barat masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat. Untuk itu, pemerintah terus menargetkan peningkatan PAD setiap tahun, melalui ekstensifikasi dan intensifikasi PAD.	Jumlah Anggaran PAD tahun ini dikurangi Jumlah Anggaran PAD tahun lalu dibagi Jumlah Anggaran PAD tahun lalu dikali 100%		Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menargetkan peningkatan PAD sebesar 3% setiap tahun, yang dihitung dari anggaran PAD di dalam APBD setiap tahunnya.



3. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh penerima dan pemberi amanah dengan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program/Kegiatan pada Tahun 2021, Perjanjian Kinerja hasil reviu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	WTP
		Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017	%	100
		Persentase peningkatan PAD	%	3



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja



sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Ordinal

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Skala Predikat Capaian Kinerja Pendekatan Permendagri No. 54 Tahun 2010

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.



Dalam laporan ini, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Misi dan Visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021, hasil reuiu, dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 900/39.a/KPTS/IV.01/2021 tentang Penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, terdiri dari 3 indikator kinerja, yaitu :
 1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, target WTP setiap tahun.
 2. Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017, target 100 % setiap tahun.
 3. Persentase peningkatan PAD, target 3 % setiap tahun.

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian, kinerja utama terkandung dari tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain, IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan



Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 900/39.a/KPTS/IV.01/2021 tentang Penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, dan melalui Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 36 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

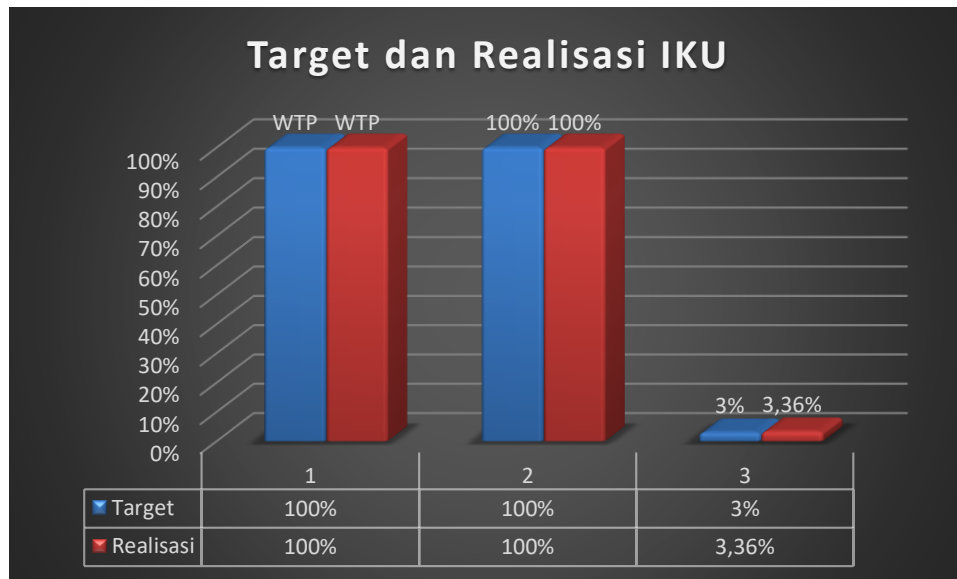
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	WTP	WTP	100
2	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017	%	100	100	100
3	Persentase peningkatan PAD	%	3	3,36	112

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase peningkatan PAD, dengan capaian kinerja 112 %.

Capaian kinerja yang sesuai target ditunjukkan pada indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja 100 %, dan pada indikator Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017, dengan capaian kinerja 100 %.

Untuk lebih jelasnya, tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Catatan, untuk indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mencapai 100 %, tidak ditampilkan di dalam grafik karena target dan realisasi tidak berupa angka.



Gambar 3.1.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

1. Pengukuran Sasaran Strategis

Secara umum, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2017-2022 sebanyak 1 sasaran dengan 3 indikator kinerja.



Tahun 2021 adalah tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari sebanyak 1 sasaran strategis dengan sebanyak 3 indikator kinerja yang ditetapkan, maka pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	WTP	WTP	100
2	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017	%	100	100	100
3	Persentase peningkatan PAD	%	3	3,36	112

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja OPD pada tabel berikut :

Tabel 3.5.
Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	33.33 %
2	Sesuai Target	66.67 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Dari sebanyak 1 sasaran di atas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 4	3	1	33.33	2	66.67	0	0.00
	Jumlah	3	1	33.33	2	66.67	0	0.00

Dari sebanyak 1 sasaran dengan sebanyak 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 4	3	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	33.33 %
2	Sesuai Target	2	66.67 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

2. Evaluasi Sasaran Strategis

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.



Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja dari sebanyak 1 misi, sebagaimana telah ditetapkan di dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022, juga membandingkan capaian tahun 2021 dengan capaian Tahun 2018 s.d 2020, serta membandingkan capaian sampai dengan tahun 2021 dengan target akhir Renstra. Pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.8.
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
2	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase peningkatan PAD	%	3	4,47	149	3	31,71	1.057	3	2.46	82	3	3.36	112

Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" adalah predikat WTP dari target predikat WTP yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.



Tahun 2021 adalah tahun ke-4 Renstra, capaian kinerja indikator 1 "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah maka capaian kerjanya mencapai 100 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017" adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2021 adalah tahun ke-4 Renstra, capaian kinerja indikator 2 "Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017" tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah maka capaian kerjanya mencapai 100 %.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Persentase peningkatan PAD" adalah sebesar 3,36 % dari target sebesar 3 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 112 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Persentase peningkatan PAD" tahun ini meningkat 30 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 82 %.

Tahun 2021 adalah tahun ke-4 Renstra, capaian kinerja indikator 3 "Persentase peningkatan PAD" s.d. tahun ini adalah sebesar 38,53 %, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 15 %, maka capaian kerjanya mencapai 256,87 %.



3. Analisis Capaian Sasaran Strategis

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9.
Analisis Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		%	Target Akhir Renstra	Capaian s.d. Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra (%)
						Target	Realisasi			
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
2	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase peningkatan PAD	%	4,47	28,24	2,46	3	3,36	112	15	256,87

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan hasil analisis atas pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah” pada tahun 2021 dari sebanyak 3 indikator sebagai berikut :

I. Penghitungan Indikator Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun 2021

a. Indikator "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah".

Indikator ini dihitung dengan penjelasan/alasan/formulasi/perhitungan :

Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, berdasarkan hasil audit terhadap proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, yang meliputi :

1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
2. Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern.
3. Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



Dengan pencapaian untuk indikator sasaran adalah : Opini WTP

Tabel 3.10.
Data Dukung Capaian Indikator Sasaran 1

No.	Data Dukung	Opini BPK
1.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdiri dari :	
	- Neraca	Wajar sesuai SAP
	- Laporan Realisasi Anggaran	Wajar sesuai SAP
	- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	Wajar sesuai SAP
	- Laporan Operasional	Wajar sesuai SAP
	- Laporan Arus Kas	Wajar sesuai SAP
	- Laporan Perubahan Ekuitas	Wajar sesuai SAP
	- Catatan atas Laporan Keuangan	Wajar sesuai SAP
2.	Sistem Pengendalian Intern	Memadai dan relevan
3.	Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Sesuai SAP

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian atas seluruh data dukung adalah memperoleh Opini Wajar dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, sehingga tercapailah target kinerja "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yaitu WTP, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor : 31.A/LHP/XVIII.BLP/05/2021 Tanggal 03 Mei 2021.

- b. Indikator "Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017".

Indikator ini dihitung dengan formulasi :

$$\frac{\sum \text{Variabel Yang Dipenuhi}}{11} \times 100 \%$$

11 variabel yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. RK BMD (Pengadaan/Pemeliharaan)
2. Standar Satuan Harga/Standar Kebutuhan
3. Pengadaan BMD
4. Inventarisasi BMD
5. Pemeliharaan dan Pengamanan
6. Pengawasan/Pengendalian/ Pembinaan
7. Pemanfaatan
8. Penggunaan
9. Penilaian
10. Penghapusan
11. Penatausahaan



Dengan pencapaian untuk indikator sasaran sebagai berikut :

$$\frac{11}{11} \times 100 \% = 100 \%$$

Tabel 3.11.
Data Dukung Capaian Indikator Sasaran 2

NO	Keterangan	Jumlah	Persen
1	Jumlah variabel yang dipenuhi	11	100%
2	Jumlah variabel	11	

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian untuk indikator kedua "Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017". Dari 11 variabel yang harus dipenuhi sebagai syarat pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017, BPKD Kabupaten Lampung Barat dapat memenuhi seluruhnya, melalui pencapaian indikator kinerja kegiatan (100 %).

c. Indikator "Persentase peningkatan PAD".

Indikator ini dihitung dengan formulasi :

$$\frac{\sum \text{anggaran PAD tahun ini} - \sum \text{anggaran PAD tahun lalu}}{\sum \text{anggaran PAD tahun lalu}} \times 100 \%$$

Dengan pencapaian untuk indikator sasaran sebagai berikut :

$$\frac{67.978.328.317,00 - 65.771.303.679,74}{65.771.303.679,74} \times 100 \% = 3,36 \%$$

Tabel 3.12.
Data Dukung Capaian Indikator Sasaran 3

NO	Keterangan	Jumlah	Persen
1	Jumlah anggaran PAD Tahun 2021	Rp. 67.978.328.317,00	3,36 %
2	Jumlah anggaran PAD Tahun 2020	Rp. 65.771.303.679,74	



Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian untuk indikator ketiga "Persentase peningkatan PAD". Capaian kinerja indikator ketiga ini adalah sebesar 112 %, dimana realisasi peningkatan PAD sebesar 3,36 % dari target 3 %. Peningkatan anggaran PAD pada TA. 2021 (Rp. 67.978.328.317,00) dari anggaran TA. 2020 (Rp. 65.771.303.679,74), dapat melampaui target 3 %.

II. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja 3 indikator sasaran dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.13.
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 Terhadap Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
2	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase peningkatan PAD	%	3	2,46	82	3	3,36	112

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan perbandingan realisasi kinerja 3 indikator sasaran tahun 2021 terhadap tahun 2020, sebagai berikut :

a. Indikator "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah".

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja indikator 1 konsisten mencapai 100 % (dapat mempertahankan Opini WTP), yang telah diraih sejak tahun 2011 hingga tahun 2021 secara berturut-turut.

b. Indikator "Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017".

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja indikator 2 konsisten mencapai 100 %, artinya pengelolaan Barang Milik Daerah setiap tahunnya telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017.

Perbandingan capaian kinerja indikator 2 pada tahun 2021 terhadap tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 3.2.

c. Indikator "Persentase peningkatan PAD".

Capaian kinerja indikator 3 tahun 2021 adalah sebesar 112 %, meningkat 30 Point dari capaian tahun 2020 yang mencapai 82 %.

Perbandingan capaian kinerja indikator 3 pada tahun 2021 terhadap tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 3.3.



III. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Renstra

Perbandingan realisasi kinerja 3 indikator sasaran dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.14.
Capaian Kinerja Sasaran s.d. Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2021	Target Akhir Renstra	Capaian s.d. Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra (%)
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	WTP	WTP	100
2	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017	%	100	100	100
3	Persentase peningkatan PAD	%	38,53	15	256,87

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan perbandingan realisasi kinerja 3 indikator sasaran tahun 2021 dengan target akhir Renstra sebagai berikut :

- a. Indikator "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah".
Tahun 2021 adalah tahun ke-4 Renstra, capaian kinerja indikator 1 setiap tahun adalah 100 %, di mana target Opini WTP selalu tercapai. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka capaian kinerjanya mencapai 100 %.
- b. Indikator "Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017".
Tahun 2021 adalah tahun ke-4 Renstra, capaian kinerja indikator 2 setiap tahun adalah sebesar 100 %. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka capaian kinerjanya mencapai 100 %.
- c. Indikator "Persentase peningkatan PAD".
Tahun 2021 adalah tahun ke-4 Renstra, capaian kinerja indikator 3 s.d. tahun ini adalah sebesar 4,47 % (2018) ditambah 28,24 % (2019) ditambah 2,46 % (2020) ditambah 3,36 % (2021) menjadi 38,53 %, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra BPKD sebesar 15 %, maka capaian kinerjanya mencapai 256,87 %.

Perbandingan realisasi kinerja 3 indikator sasaran tahun 2021 dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 3.4.

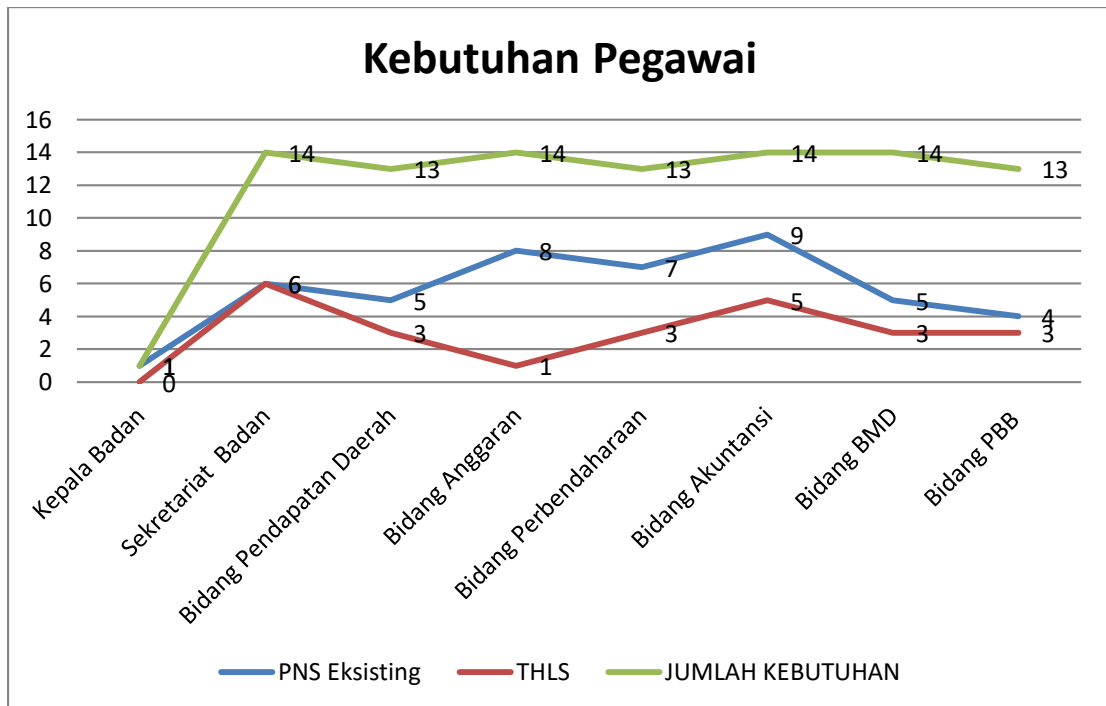
3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam tahun 2021, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci, pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat dari sebanyak 4 indikator, yaitu :
 1. Indikator 1 "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", realisasi kinerja tahun ini adalah Opini WTP dari target Opini WTP yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.
 2. Indikator 2 "Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017", realisasi kinerja tahun ini adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

3. Indikator 3 "Persentase peningkatan PAD", realisasi kinerja tahun ini adalah sebesar 3,36 % dari target sebesar 3 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 112 %, capaian ini melampaui target yang diperjanjikan.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum dapat mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumber daya aparatur sebagaimana terlihat pada grafik berikut :



Gambar 3.5.

Berdasarkan Gambar 3.6 di atas, terlihat bahwa kinerja 96 pegawai sesuai jumlah kebutuhan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat ditangani oleh 45 pegawai ditambah dengan 24 THLS sesuai kondisi yang ada. THLS yang ada merupakan Tenaga kontrak tipe B yang memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Daerah.



Selain didukung oleh sumber daya aparatur, keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah juga diperoleh dengan dukungan sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Mesin dan peralatan :
 - Alat berat : 2 unit
 - Kendaraan roda empat : 6 unit
 - Kendaraan roda dua : 22 unit
 - Alat bengkel : 3 unit
 - Alat ukur : 2 unit
 - Alat kantor dan rumah tangga : 1.488 buah
 - Alat pertanian : 1 buah
 - Alat studio dan komunikasi : 28 unit
2. Gedung dan bangunan :
 - Bangunan gedung : 647 m2
 - Bangunan monumen : 276 buah
3. Jalan, jembatan, bangunan air, jaringan dan instalasi :
 - Jaringan/instalasi : 2 unit
4. Aset tetap lainnya :
 - Buku : 1 paket
5. Aset tak berwujud : 21 unit
6. Aset lain-lain : 318 buah

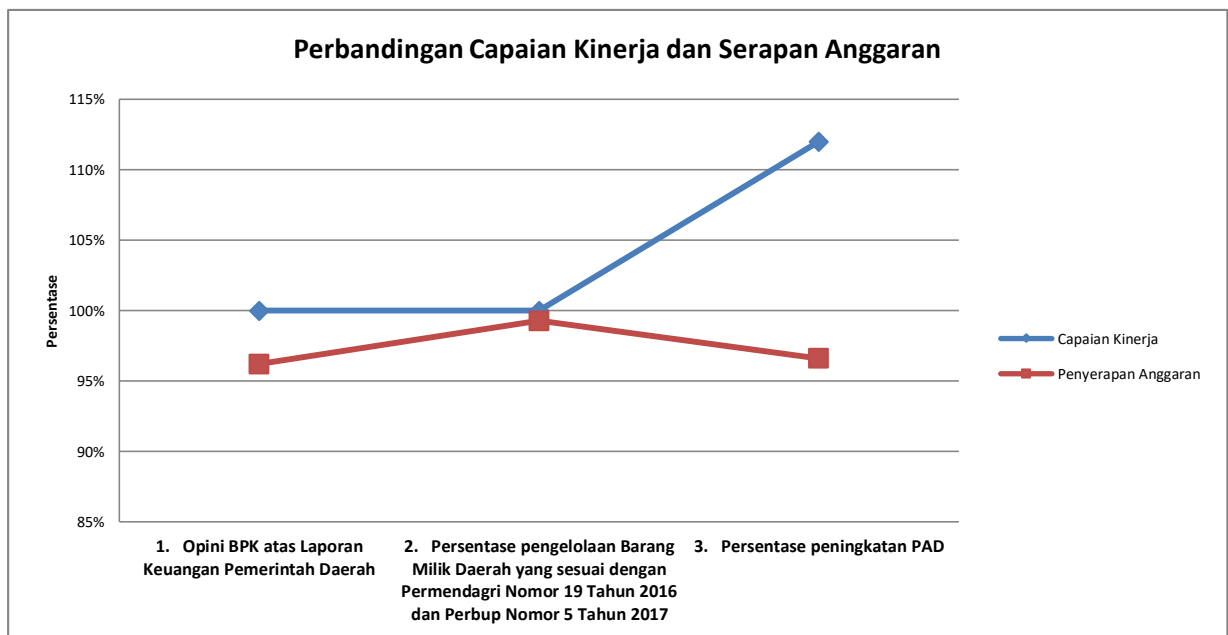
Pada Tahun Anggaran 2021, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah membiayai kegiatannya dengan anggaran sebesar Rp. 217.271.140.942,06, untuk mencapai kinerjanya. Berdasarkan pagu anggaran tersebut, realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebesar Rp. 209.091.143.910,00 atau 96,24 % dari anggaran yang direncanakan dan telah mewujudkan semua target kinerjanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sudah cukup optimal, efektif dan efisien dalam mencapai kinerja sasarnya, dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki, berupa sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, serta anggaran.

Efisiensi penggunaan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.15.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	96,21 %	3,79 %
		2. Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017	100 %	99,28 %	0,72 %
		3. Persentase peningkatan PAD	112 %	96,60 %	15,40 %
Jumlah Total Efisiensi					19,91 %
Rata-rata Efisiensi per Indikator					6,64 %

Berdasarkan tabel di atas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sepanjang tahun 2021 telah melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan capaian sangat memuaskan, yang terlihat dari pencapaian indikator kinerja yang sesuai target bahkan melampaui target kinerja. Selanjutnya, dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, total efisiensi anggaran mencapai 19,91 % dengan rata-rata efisiensi per indikator sasaran mencapai 6,64 %, di mana terdapat 1 capaian kinerja yang berada di bawah realisasi anggaran, yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 sebagaimana dijelaskan di atas. Sebagai gambaran lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 3.6.



3.5 Faktor Pendukung Keberhasilan, Permasalahan, dan Solusi

Pencapaian indikator sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang sesuai target dan bahkan melampaui target kinerja dapat terwujud karena didukung oleh beberapa hal, yaitu :

1. Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.

Kabupaten Lampung Barat selama 11 tahun berturut-turut meraih penghargaan berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan dinilai wajar dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), memiliki Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penganggaran berbasis kinerja.

Meski saat ini tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi di mana alokasi PAD Kabupaten Lampung Barat terhadap total pendapatan daerah masih rendah, namun Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat mengelola APBD dengan baik. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki *cash flow* yang sehat dan tidak pernah mengalami gagal bayar untuk alokasi belanja yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan penganggaran yang berbasis kinerja, memperhatikan prioritas daerah, sesuai kebutuhan, dan taat aturan.

3. Adanya Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah memiliki aplikasi yang terintegrasi, yaitu Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD), yang terdiri dari aplikasi e-SSH, e-RPJMD, e-Renstra, e-Musrenbang, e-RKPD, dan e-Budgeting.

Dalam pencapaian indikator sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat, masih ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat pencapaian target kinerja, antara lain :

1. Potensi PAD belum tergali dan terkelola dengan optimal.

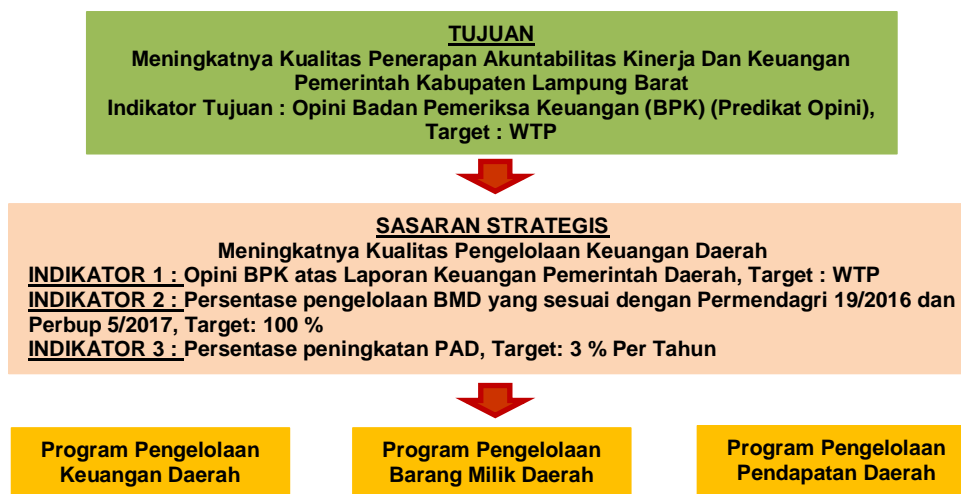
2. Target peningkatan PAD sulit tercapai akibat pandemi Covid-19, yang mengharuskan diambilnya kebijakan pemberian stimulus Pajak dan Retribusi Daerah, ataupun akibat kondisi *force majeure* lain yang tidak dapat diprediksi ke depannya.
3. Target peningkatan Pendapatan Daerah tidak tercapai yang disebabkan oleh kebijakan refocussing APBN dengan pengurangan Dana Transfer ke daerah akibat pandemi Covid-19, ataupun kondisi *force majeure* lain yang tidak dapat diprediksi ke depannya.
4. Penatausahaan Barang Milik Daerah belum optimal.

Sehubungan dengan permasalahan yang masih ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, solusi yang dapat dilakukan agar ke depannya dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Melaksanakan pendataan potensi PAD sebagai langkah awal eksplorasi potensi PAD.
2. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.
3. Meningkatkan koordinasi dan menciptakan sinergi baik di internal BPKD, dengan seluruh OPD, maupun dengan seluruh stakeholders.

3.6 Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan

Tujuan, sasaran, dan program yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 3.7.
Tujuan, Sasaran, dan Program



Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tertuang di dalam gambar di atas adalah “Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat”. Tujuan tersebut dicapai melalui Sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah”.

Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah didukung oleh serangkaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada TA. 2021 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
 11. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 12. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 13. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.
 - 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 14. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.



- 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 15. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 16. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 18. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 20. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 21. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 25. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 26. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :
 - 10) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 27. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
 28. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
 29. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
 30. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
 31. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
 32. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan.



- 11) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 33. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
 34. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
 35. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
 36. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
 37. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas.
 38. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait.
 39. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 12) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah terdiri dari sub kegiatan :
 40. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.
 41. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban.
 42. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.
 43. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 44. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.



45. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
 46. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah.
 47. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
 48. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 13) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
49. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
- 14) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
50. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan kegiatan :
- 15) Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
51. Penyusunan Standar Harga.
 52. Penatausahaan Barang Milik Daerah.
 53. Inventarisasi Barang Milik Daerah.
 54. Pengamanan Barang Milik Daerah.
 55. Penilaian Barang Milik Daerah.
 56. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 57. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
 58. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
 59. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
 60. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :
- 16) Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
61. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.



62. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
63. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
64. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
65. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
66. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah.
67. Penagihan Pajak Daerah.

3.7 Inovasi dan Prestasi yang Diraih Perangkat Daerah

Pencapaian indikator kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang sesuai target dapat terwujud karena didukung oleh beberapa inovasi yang dilakukan, yaitu :

1. Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi (SIPAKDE).

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah memiliki aplikasi yang terintegrasi, yaitu Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD), yang terdiri dari aplikasi e-SSH, e-RPJMD, e-Renstra, e-Musrenbang, e-RKPD, dan e-Budgeting.

2. PBB Online.

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan PT. BPD Lampung, yaitu pembayaran PBB P2 secara online untuk masyarakat umum melalui Bank Lampung dan Agen L Smart yang ada di Kecamatan/Pekon.

3. Aset Online.

Aplikasi ini memungkinkan pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Lampung Barat diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Aset Online dapat diakses dengan menginstal aplikasi "QR & Barcode" pada Playstore.

Pada tahun 2021, Kabupaten Lampung Barat kembali meraih prestasi berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Ini adalah untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut Kabupaten Lampung Barat meraih Opini WTP.



Gambar 3.8.
Bupati Lampung Barat Menerima Penghargaan Opini WTP
dari BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 3 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci, pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator, yaitu :
 1. Indikator 1 "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", realisasi kinerja tahun ini adalah Opini WTP dari target Opini WTP yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.
 2. Indikator 2 "Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017", realisasi kinerja tahun ini adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.



3. Indikator 3 "Persentase peningkatan PAD", realisasi kinerja tahun ini adalah sebesar 3,36 % dari target sebesar 3 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 112 %, capaian ini melampaui target yang diperjanjikan.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, semuanya dapat mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, bahkan melampauinya.

Dalam Tahun Anggaran 2021, pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 217.271.140.942,06, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 209.091.143.910,00 atau 96,24 %, dengan demikian dapat dikatakan kondisi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 adalah SILPA Rp. 8.179.997.032,06.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke-4 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2021, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator, yaitu :
 1. Indikator 1 "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", capaian kinerja tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka capaian kinerjanya mencapai 100 %.
 2. Indikator 2 "Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017", capaian kinerja tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka capaian kinerjanya mencapai 100 %.



- Indikator 3 "Persentase peningkatan PAD", realisasi kinerja tahun ini adalah sebesar 3,36 % dari target 3 % (112 %). Realisasi kinerja hingga tahun ke-4 adalah sebesar 38,53 %, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (15 %), maka capaian kinerjanya sebesar 256,87 %.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 217.271.140.942,06 (Dua ratus tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus empat pulu dua koma nol enam rupiah), dan telah mewujudkan capaian kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Berdasarkan pagu anggaran tersebut, maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah 96,24 % dari anggaran yang direncanakan.

Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat sudah cukup optimal, efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait, baik *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Barat, Februari 2022

ms
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, e

Ir. OKMAL M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641005 199403 1 003

LAMPIRAN

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No	Program		Pagu Anggaran Tahun 2021	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran 1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah										
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										
	1.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.683.666.000.00	0.00	0	410.090.472.00	15.28	1.243.253.172.00	46.33	2.211.799.261.00	82.42
	1.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	586.562.000.00	110.491.500.00	18.84	215.959.264.00	36.82	311.272.764.00	53.07	516.344.855.00	88.03
	1.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.189.010.900.00	279.216.650.00	23.48	557.159.650.00	46.86	700.228.650.00	58.89	1.096.929.150.00	92.26
	1.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	186.149.197.471.00	525.443.000.00	0.28	22.024.184.000.00	11.83	144.195.038.200.00	77.46	183.949.883.100.00	98.82
	1.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	267.734.000.00	0.00	0	32.015.417.00	11.96	92.855.217.00	34.68	206.429.400.00	77.1
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										
	2.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.469.417.400.00	166.519.000.00	11.33	633.592.400.00	43.12	1.153.815.066.00	78.52	1.458.804.572.00	99.28
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										
	3.1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.654.452.200.00	212.313.500.00	12.83	622.262.000.00	37.61	919.102.300.00	55.55	1.598.236.000.00	96.6
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	4.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.210.000.00	5.770.000.00	23.83	10.717.500.00	44.27	15.230.000.00	62.91	24.210.000.00	100
	4.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.566.261.557.00	822.309.861.00	18.01	2.189.890.895.00	47.96	3.158.051.171.00	69.16	4.237.463.820.00	92.8
	4.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.904.000.00	1.177.000.00	24	2.027.000.00	41.33	3.187.000.00	64.99	4.904.000.00	100
	4.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	35.920.000.00	8.641.000.00	24.06	17.312.000.00	48.2	25.976.000.00	72.32	35.920.000.00	100
	4.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000.00	25.000.000.00	41.67	25.000.000.00	41.67	40.000.000.00	66.67	55.000.000.00	91.67



No	Program		Pagu Anggaran Tahun 2021	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	369.117.000.00	54.721.700.00	14.83	154.377.000.00	41.82	213.626.700.00	57.88	368.758.120.00	99.9
	4.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.058.000.00	0.00	0	63.100.000.00	47.07	68.790.000.00	51.31	134.058.000.00	100
	4.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.531.738.414.00	3.101.397.907.00	17.69	6.331.508.687.00	36.11	9.552.196.759.00	54.49	12.659.929.982.00	72.21
	4.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	544.892.000.00	74.526.570.00	13.68	203.124.690.00	37.28	405.834.750.00	74.48	532.473.650.00	97.72
Total Per Sasaran			217.271.140.942.00	5.387.527.688.00	2.48	33.492.320.975.00	15.41	162.098.457.749.00	74.61	209.091.143.910.00	96.24
Grand Total			217.271.140.942.00	5.387.527.688.00	2.48	33.492.320.975.00	15.41	162.098.457.749.00	74.61	209.091.143.910.00	96.24

**EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Urusan Penunjang Bidang Keuangan	100 %	100 %	100 %	Jumlah Bidang Urusan yang dilaksanakan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100%	23.271.100.971	18.052.717.572	77,58%
1		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	40 Dokumen	40 Dokumen	100%	24.210.000	24.210.000	100%
1)		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	1.365.000	1.365.000	100%
2)		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1.870.000	1.870.000	100%
3)		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1.870.000	1.870.000	100%
4)		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1.870.000	1.870.000	100%
5)		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1.870.000	1.870.000	100%
6)		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	13.900.000	13.900.000	100%
7)		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Laporan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Laporan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	1.465.000	1.465.000	100%
2		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4.566.261.557	4.237.463.820	92,80%
8)		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100 %	100 %	100 %	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100%	4.563.246.557	4.234.448.820	92,79%
9)		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1.055.000	1.055.000	100%
10)		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran SKPD	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	905.000	905.000	100%
11)		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1.055.000	1.055.000	100%
3		Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4.904.000	4.904.000	100%
12)		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4.904.000	4.904.000	100%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4		Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan Pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah dokumen Laporan Pendapatan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	35.920.000	35.920.000	100%
13)		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Pendapatan Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah dokumen Laporan Pendapatan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	35.920.000	35.920.000	100%
5		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	100 %	100 %	Jumlah aparatur yang meningkat disiplin dan kapasitasnya	6 Orang	6 Orang	100%	60.000.000	55.000.000	91,67%
14)		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terakomodirnya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	100 %	100 %	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	6 Orang	6 Orang	100%	60.000.000	55.000.000	91,67%
6		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Sub Organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian	7 Sub Organisasi	7 Sub Organisasi	100%	369.117.000	368.758.120	99,90%
15)		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	100 %	100 %	Jumlah Jenis Komponen Listrik	5 Jenis	5 Jenis	100%	5.983.000	5.983.000	100%
16)		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 %	100 %	100 %	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	10 Jenis	10 Jenis	100%	109.950.000	109.950.000	100%
17)		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	100 %	100 %	100 %	Jumlah SKHU	4 SKHU	4 SKHU	100%	3.960.000	3.960.000	100%
18)		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum tamu	100 %	100 %	100 %	Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu	60 Kali	60 Kali	100%	4.140.000	4.140.000	100%
19)		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	245.084.000	244.725.120	99,85%
7		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah pengadaan peralatan kantor	18 Unit	18 Unit	100%	134.058.000	134.058.000	100%
20)		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	100 %	100 %	100 %	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	18 Unit	18 Unit	100%	134.058.000	134.058.000	100%
8		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Urusan Penunjang Bidang Keuangan	100 %	100 %	100 %	Jumlah Sub Organisasi yang ditunjang urusan pemerintahannya	7 Sub Organisasi	7 Sub Organisasi	100%	17.531.738.414	12.659.929.982	72,21%
21)		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100 %	100 %	100 %	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1935 Surat	4562 Surat	235,76%	4.900.000	4.893.000	99,86%
22)		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	100 %	100 %	Jumlah Rekening Telepon (Termasuk Speedy) 2 Rekening, Jumlah Rekening Air 1 Rekening, Jumlah Rekening Listrik 4 Rekening	7 Rekening	7 Rekening	100%	103.350.000	51.336.087	49,67%
23)		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 %	100 %	100 %	Jumlah Sub Organisasi yang ditunjang urusan pemerintahannya	7 Sub Organisasi	7 Sub Organisasi	100%	17.423.488.414	12.603.700.895	72,34%
9		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	100%	544.892.000	532.473.650	97,72%
24)		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100 %	100 %	100 %	Jumlah Mobil Yang Dilaksanakan Pemeliharaan dan Perijinan 6 Unit, Jumlah Motor Yang Dilaksanakan Pemeliharaan dan Perijinan 26 Unit	32 Unit	32 Unit	100%	367.027.000	354.608.650	96,62%
25)		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor	100 %	100 %	100 %	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara	43 Unit	43 Unit	100%	34.725.000	34.725.000	100%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
26)		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	100 %	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	10 Gedung	10 Gedung	100%	143.140.000	143.140.000	100%
II		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	100 %	100 %	100 %	Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran 100%, Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran 100%, Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan akurat 100%, Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat 100%, Persentase manajemen/pengelolaan kas daerah yang efektif dan efisien 100%, Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu 100%	100 %	100 %	100%	190.876.170.371	187.981.385.766	98,48%
10		Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan, Jumlah Buku APBD dan Buku Perubahan APBD, Jumlah Buku Rancangan Anggaran PAD dan Buku Rancangan Anggaran Perubahan PAD	540 Eksemplar	540 Eksemplar	100%	2.683.666.000	2.211.799.261	82,42%
27)		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Lampung Barat	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	160 Eksemplar	160 Eksemplar	100%	149.684.000	136.371.068	91,11%
28)		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS Perubahan Kabupaten Lampung Barat	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan	160 Eksemplar	160 Eksemplar	100%	137.795.000	104.030.500	75,50%
29)		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Rancangan APBD Kabupaten Lampung Barat	100 %	100 %	100 %	Jumlah Buku APBD 60 Eksemplar, Jumlah Buku Penjabaran APBD 600 Eksemplar, Jumlah DPA OPD 1.760 Eksemplar	2420 Eksemplar	2420 Eksemplar	100%	932.770.000	757.260.789	81,18%
30)		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lampung Barat	100 %	100 %	100 %	Jumlah Buku Perubahan APBD 60 Eksemplar, Jumlah Buku Penjabaran Perubahan APBD 600 Eksemplar, Jumlah DPPA OPD 1.760 Eksemplar	2420 Eksemplar	2420 Eksemplar	100%	1.017.020.000	910.650.904	89,54%
31)		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100 %	100 %	100 %	Jumlah Buku Pedoman Penyusunan RKA SKPD 100 Eks, Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan APBD 100 Eks, Jumlah Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 100 Eks, Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Pokok-Pokok	100 Eksemplar, 100 Eksemplar, 100 Eksemplar, 132 Orang	100 Eksemplar, 100 Eksemplar, 0 Eksemplar, 0 Orang	100%, 100%, 0%, 0%	267.075.000	125.604.000	47,03%
32)		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Tersusunnya Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat	100 %	100 %	100 %	Jumlah Draft Rancangan Anggaran PAD, Jumlah Buku Rancangan Anggaran PAD, Jumlah Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD, Jumlah Buku Rancangan Anggaran Perubahan PAD	200 Eksemplar	200 Eksemplar	100%	179.322.000	177.882.000	99,20%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11		Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	100 %	100 %	100 %	Persentase penerbitan SPD yang tepat waktu dan akurat 100%, Persentase penyerapan Dana Transfer 100%, Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan akurat 100%, Jumlah Laporan Kas Daerah 60 Eksemplar, Jumlah Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat 50 Eksemplar, Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat 100%, Nilai Rata-rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD 80 Point	100%, 110 Eksemplar, 80 Point	100%, 110 Eksemplar, 81 Point	100%, 100%, 101,25%	586.562.000	516.344.855	88,03%
33)		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya penerbitan SPD OPD	100 %	100 %	100 %	Jumlah OPD yang diterbitkan SPDnya	44 OPD	44 OPD	100%	5.621.000	5.246.000	93,33%
34)		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terserapnya Dana Transfer untuk mendukung program pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %	Persentase penyerapan Dana Transfer	100 %	97,95 %	97,95%	58.320.000	56.396.000	96,70%
35)		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya koordinasi, kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dalam rangka pembayaran gaji pegawai dengan Lembaga Keuangan Bank	100 %	100 %	100 %	Jumlah Daftar Gaji Bulanan 528 Eksemplar, Jumlah BA Hasil Rekonsiliasi Data PNSD 0 Eksemplar	528 Eksemplar	528 Eksemplar	100%	231.079.000	214.131.000	92,67%
36)		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100 %	100 %	100 %	Jumlah Laporan Kas Daerah	60 Eksemplar	60 Eksemplar	100%	77.309.000	53.297.275	68,94%
37)		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Tersedianya data Piutang dan Utang Daerah Kabupaten Lampung Barat	100 %	100 %	100 %	Jumlah Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat	50 Eksemplar	50 Eksemplar	100%	32.885.000	32.885.000	100%
38)		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya rekonsiliasi data Penerimaan dan Pengeluaran Kas terkait penerbitan SP2D	100 %	100 %	100 %	Jumlah BA Hasil Rekonsiliasi 60 eksemplar dan persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat 100%	60 Eksemplar, 100 %	60 Eksemplar, 100 %	100%, 100%	160.255.000	135.075.764	84,29%
39)		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	Nilai Rata-Rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD	80 Point	81 Point	101,25%	21.093.000	19.313.816	91,57%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
12		Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Buku Laporan Keuangan Pemda 80 Eksemplar, Jumlah Buku Perda Realisasi APBD 110 Eksemplar, Jumlah Buku Laporan Keuangan SKPD 135 Eksemplar	325 Eksemplar	325 Eksemplar	100%	1.189.010.900	1.096.929.150	92,26%
40)		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kertas Kerja Akuntansi Per Bulan	45 Dokumen	45 Dokumen	100%	64.788.400	64.265.400	99,19%
41)		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	100 %	100 %	100 %	Jumlah Buku Laporan Bulanan Rekonsiliasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, Jumlah Buku Laporan Semester Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas, Jumlah Buku Laporan Triwulan Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Pendapatan LO dan	810 Eksemplar	810 Eksemplar	100%	105.506.000	105.482.650	99,98%
42)		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Terlaksananya koordinasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100 %	100 %	100 %	Jumlah Buku Laporan Realisasi APBD Per Semester, Jumlah Laporan Realisasi APBD Bulanan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100%	127.570.000	111.783.000	87,62%
43)		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya konsolidasi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Draf LKPD, Jumlah Buku LKPD, Jumlah Buku Pidato Pengantar LKPD, Jumlah Draf LK SKPD, Jumlah Buku LK SKPD, Jumlah Laporan Triwulan Dana TP dan UB, Jumlah Laporan Akhir Tahun Dana TP dan UB	564 Eksemplar	564 Eksemplar	100%	283.795.000	245.618.500	86,55%
44)		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 %	100 %	100 %	Jumlah Buku Ranperda Realisasi APBD 80 Eks, Jumlah Buku Ranperbup Realisasi APBD 80 Eks, Jumlah Buku Perda Realisasi APBD 110 Eks, Jumlah Buku Perbup Realisasi APBD 110 Eks	380 Eksemplar	380 Eksemplar	100%	343.844.500	331.820.700	96,50%
45)		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terlaksananya penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tanggapan atas Temuan BPK, Jumlah Dokumen Quisioner dalam Pemeriksaan BPK, Jumlah Dokumen Rencana Aksi atas Temuan Pemeriksaan BPK	9 Eksemplar	9 Eksemplar	100%	32.499.000	20.877.000	64,24%
46)		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Sidang Majelis TP TGR	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	120.935.000	119.823.900	99,08%
47)		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terlaksananya penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 %	100 %	100 %	Jumlah Laporan Analisis Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	24 Eksemplar	24 Eksemplar	100%	30.612.000	30.547.000	99,79%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
48)		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten	100 %	100 %	100 %	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Jumlah Peserta Bimtek	148 Orang	148 Orang	100%	79.461.000	66.711.000	83,95%
13		Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	100 %	100 %	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan	100 %	98,82 %	98,82%	186.149.197.471	183.949.883.100	98,82%
49)		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya penyaluran Bantuan Keuangan Daerah	100 %	100 %	100 %	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan	100 %	98,82 %	98,82%	186.149.197.471	183.949.883.100	98,82%
14		Kegiatan : Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan	Terlaksananya pengelolaan data berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %	100 %	100 %	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu	100 %	100 %	100%	267.734.000	206.429.400	77,10%
50)		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya implementasi dan pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi (perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan)	100 %	100 %	100 %	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu	100 %	100 %	100%	267.734.000	206.429.400	77,10%
III		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah yang optimal	100 %	100 %	100 %	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat	100 %	100 %	100%	1.469.417.400	1.458.804.572	99,28%
15		Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan	100 %	100 %	100 %	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemda, Jumlah Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Pemda	24 Eksemplar	24 Eksemplar	100%	1.469.417.400	1.458.804.572	99,28%
51)		Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	100 %	100 %	100 %	Jumlah buku Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung	20 Eksemplar	20 Eksemplar	100%	66.148.500	65.277.300	98,68%
52)		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	Persentase Input Data Barang Milik Daerah dan akurat	100 %	100 %	100%	195.574.000	194.576.866	99,49%
53)		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya inventarisasi Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah buku Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	45 Eksemplar	45 Eksemplar	100%	295.405.000	294.169.400	99,58%
54)		Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengamanan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Plang Kepemilikan Tanah	10 Unit	10 Unit	100%	92.709.000	92.709.000	100%
55)		Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya penilaian Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	48 Eksemplar	48 Eksemplar	100%	414.781.000	412.188.000	99,37%
56)		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terawasi dan terkendali	100 %	100 %	100%	35.960.000	35.960.000	100%
57)		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	Persentase Realisasi Retribusi Daerah, Persentase BMD Terhapus Dari DBMD Akibat Alasan Yang Sah (Pemindahtanganan, Keputusan Pengadilan, Peraturan Perundangan, dan Pemusnahan) Dari Usulan OPD	100 %, 100 %	81,43 %, 100 %	81,43%, 100%	121.060.000	117.664.000	97,19%
58)		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik	100 %	100 %	100 %	Jumlah Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna	45 Eksemplar	45 Eksemplar	100%	128.490.000	126.970.106	98,82%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
59)		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah LBMD Pemda, Jumlah LBMD OPD, Jumlah DBMD Pemda	112 Eksemplar	112 Eksemplar	100%	63.960.900	63.960.900	100%
60)		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah OPD yang Dibina	44 OPD	44 OPD	100%	55.329.000	55.329.000	100%
IV		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Terlaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	100 %	100 %	100 %	Persentase realisasi PAD	100 %	105,11 %	105,11%	1.654.452.200	1.598.236.000	96,60%
							Persentase realisasi PBB	100 %	100,86 %	100,86%			
16		Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	100 %	100 %	100 %	Persentase realisasi PAD	100 %	105,11 %	105,11%	1.654.452.200	1.598.236.000	96,60%
							Persentase realisasi PBB	100 %	100,86 %	100,86%			
61)		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan	Tercapainya target PAD	100 %	100 %	100 %	Persentase Realisasi PAD	100 %	105,11 %	105,11%	77.881.000	77.439.000	99,43%
62)		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah baliho, jumlah banner sosialisasi	161 Buah	161 Buah	100%	97.333.800	97.083.800	99,74%
63)		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah objek PBB P2 yang dimutakhirkan	10.000 Objek Pajak	10.000 Objek Pajak	100%	159.915.000	142.931.000	89,38%
64)		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data Pajak Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah SPPT PBB P2 tersampaikan kepada seluruh wajib pajak 130.000 lembar, Persentase Data Objek Pajak masuk ke dalam Database SISMIOP	130.000 lembar, 100%	130.000 lembar, 100%	100%, 100%	552.077.200	531.590.000	96,29%
65)		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksananya penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100 %	100 %	100 %	Persentase Realisasi PBB	100 %	100,86 %	100,86%	182.090.000	181.804.000	99,84%
66)		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tercapainya target PAD	100 %	100 %	100 %	Jumlah Feedback Laporan Bulanan 480 Eksemplar dan Jumlah Feedback Laporan Triwulan 160 Eksemplar, Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 100 %	640 Eksemplar, 100 %	640 Eksemplar, 97,85 %	100%, 97,85%	367.464.000	351.770.000	95,73%
67)		Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan Pajak Daerah	100 %	100 %	100 %	Jumlah Buku Laporan 170 Eksemplar, Persentase Realisasi PBB 100%	170 Eksemplar, 100 %	170 Eksemplar, 100,86 %	100%, 100,86%	217.691.200	215.618.200	99,05%
Total Pagu											217.271.140.942	209.091.143.910	96,24%

**EVALUASI RENCANA AKSI TINGKAT TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERIODE 2018-2022
TAHUN 2021**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN AKUMULATIF				REALISASI KINERJA TUJUAN AKUMULATIF				SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN AKUMULATIF				REALISASI KINERJA SASARAN AKUMULATIF				NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Predikat Opini).	-	WTP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	WTP	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	-	WTP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	WTP	Kepala BPKD
												2. Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017.	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	Kepala BPKD
												3. Persentase peningkatan PAD.	3%	3%	3%	3%	5,79%	7,08%	7,08%	3,36%	Kepala BPKD

**EVALUASI RENCANA AKSI TINGKAT PROGRAM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERIODE 2018-2022
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		NAMA JABATAN PENANGGUNG	
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Urusan Penunjang Bidang Keuangan	Jumlah Bidang Urusan yang dilaksanakan	TW 1 = 1 Bidang Urusan	TW 1 = 1 Bidang Urusan	TW 1 = Rp. 6.114.851.719,00	TW 1 = Rp. 4.093.544.038,00	Sekretaris	
					TW 2 = 1 Bidang Urusan	TW 2 = 1 Bidang Urusan	TW 2 = Rp. 12.438.123.512,00	TW 2 = Rp. 8.997.057.772,00		
					TW 3 = 1 Bidang Urusan	TW 3 = 1 Bidang Urusan	TW 3 = Rp. 18.106.870.192,00	TW 3 = Rp. 13.482.892.380,00		
					TW 4 = 1 Bidang Urusan	TW 4 = 1 Bidang Urusan	TW 4 = Rp. 23.271.100.971,00	TW 4 = Rp. 18.052.717.572,00		
		2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran	TW 1 = 25 %	TW 1 = 25 %	TW 1 = Rp. 1.519.151.965,00	TW 1 = Rp. 915.151.150,00	Kabid Anggaran	
					TW 2 = 50 %	TW 2 = 50 %	TW 2 = Rp. 75.673.298.210,00	TW 2 = Rp. 23.239.408.803,00		
					TW 3 = 75 %	TW 3 = 75 %	TW 3 = Rp. 149.847.069.674,00	TW 3 = Rp. 146.574.663.420,00		
					TW 4 = 100 %	TW 4 = 100 %	TW 4 = Rp. 190.876.170.371,06	TW 4 = Rp. 187.981.385.766,00		
				Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran	TW 1 = 25 %	TW 1 = 25 %				Kabid Pendapatan Daerah
					TW 2 = 50 %	TW 2 = 50 %				
					TW 3 = 75 %	TW 3 = 75 %				
					TW 4 = 100 %	TW 4 = 100 %				
				Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan akurat	TW 1 = 100 %	TW 1 = 100 %				Kabid Perbendaharaan
					TW 2 = 100 %	TW 2 = 100 %				
					TW 3 = 100 %	TW 3 = 100 %				
					TW 4 = 100 %	TW 4 = 100 %				
				Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat	TW 1 = 100 %	TW 1 = 100 %				Kabid Perbendaharaan
					TW 2 = 100 %	TW 2 = 100 %				
					TW 3 = 100 %	TW 3 = 100 %				
					TW 4 = 100 %	TW 4 = 100 %				
		Persentase manajemen/pengelolaan kas daerah yang efektif dan efisien	TW 1 = 100 %	TW 1 = 100 %			Kabid Perbendaharaan			
			TW 2 = 100 %	TW 2 = 100 %						
			TW 3 = 100 %	TW 3 = 100 %						
			TW 4 = 100 %	TW 4 = 100 %						
		Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu	TW 1 = 0 %	TW 1 = 0 %			Kabid Akuntansi			
			TW 2 = 100 %	TW 2 = 100 %						
			TW 3 = 100 %	TW 3 = 100 %						
			TW 4 = 100 %	TW 4 = 100 %						
		3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah yang optimal	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat	TW 1 = 25 %	TW 1 = 25 %	TW 1 = Rp. 656.492.500,00	TW 1 = Rp. 166.519.000,00	Kabid Barang Milik Daerah	
					TW 2 = 50 %	TW 2 = 50 %	TW 2 = Rp. 1.037.944.700,00	TW 2 = Rp. 633.592.400,00		
					TW 3 = 75 %	TW 3 = 75 %	TW 3 = Rp. 1.343.029.200,00	TW 3 = Rp. 1.153.815.066,00		
					TW 4 = 100 %	TW 4 = 100 %	TW 4 = Rp. 1.469.417.400,00	TW 4 = Rp. 1.458.804.572,00		
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	Persentase Realisasi PAD	TW 1 = 25 %	TW 1 = 20,86 %	TW 1 = Rp. 426.227.500,00	TW 1 = Rp. 212.313.500,00	Kabid Pendapatan Daerah			
			TW 2 = 50 %	TW 2 = 38,84 %	TW 2 = Rp. 885.159.500,00	TW 2 = Rp. 622.262.000,00				
			TW 3 = 75 %	TW 3 = 68,23 %	TW 3 = Rp. 1.083.993.300,00	TW 3 = Rp. 919.102.300,00				
			TW 4 = 100 %	TW 4 = 105,11 %	TW 4 = Rp. 1.654.452.200,00	TW 4 = Rp. 1.598.236.000,00				
		Persentase Realisasi PBB	TW 1 = 1 %	TW 1 = 3,48 %			Kabid PBB			
			TW 2 = 5 %	TW 2 = 8,43 %						
			TW 3 = 75 %	TW 3 = 89,36 %						
			TW 4 = 100 %	TW 4 = 100,86 %						

**EVALUASI RENCANA AKSI TINGKAT KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERIODE 2018-2022
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	TW 1 = 18 Dokumen	TW 1 = 18 Dokumen	TW 1 = Rp. 6.402.500,00	TW 1 = Rp. 5.770.000,00	Kasubbag Perencanaan dan Kasubbag Keuangan
						TW 2 = 27 Dokumen	TW 2 = 27 Dokumen	TW 2 = Rp. 12.250.000,00	TW 2 = Rp. 10.717.500,00	
						TW 3 = 32 Dokumen	TW 3 = 32 Dokumen	TW 3 = Rp. 17.012.500,00	TW 3 = Rp. 15.230.000,00	
			2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun	TW 4 = 40 Dokumen	TW 4 = 40 Dokumen	TW 4 = Rp. 24.210.000,00	TW 4 = Rp. 24.210.000,00	Kasubbag Keuangan
						TW 1 = 0 Dokumen	TW 1 = 0 Dokumen	TW 1 = Rp. 1.027.104.479,00	TW 1 = Rp. 822.309.861,00	
						TW 2 = 1 Dokumen	TW 2 = 1 Dokumen	TW 2 = Rp. 2.713.585.732,00	TW 2 = Rp. 2.189.890.895,00	
			3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	TW 3 = 2 Dokumen	TW 3 = 2 Dokumen	TW 3 = Rp. 3.723.531.372,00	TW 3 = Rp. 3.158.051.171,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
						TW 4 = 4 Dokumen	TW 4 = 4 Dokumen	TW 4 = Rp. 4.566.261.557,00	TW 4 = Rp. 4.237.463.820,00	
						TW 1 = 1 Dokumen	TW 1 = 1 Dokumen	TW 1 = Rp. 1.177.000,00	TW 1 = Rp. 1.177.000,00	
		4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan Pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Pendapatan Daerah	TW 2 = 2 Dokumen	TW 2 = 2 Dokumen	TW 2 = Rp. 2.027.000,00	TW 2 = Rp. 2.027.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
					TW 3 = 3 Dokumen	TW 3 = 3 Dokumen	TW 3 = Rp. 3.554.000,00	TW 3 = Rp. 3.187.000,00		
					TW 4 = 4 Dokumen	TW 4 = 4 Dokumen	TW 4 = Rp. 4.904.000,00	TW 4 = Rp. 4.904.000,00		
		5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur yang meningkat disiplin dan kapasitasnya	TW 1 = 1 Dokumen	TW 1 = 1 Dokumen	TW 1 = Rp. 8.641.000,00	TW 1 = Rp. 8.641.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
					TW 2 = 2 Dokumen	TW 2 = 2 Dokumen	TW 2 = Rp. 17.312.000,00	TW 2 = Rp. 17.312.000,00		
					TW 3 = 2 Dokumen	TW 3 = 2 Dokumen	TW 3 = Rp. 25.976.000,00	TW 3 = Rp. 25.976.000,00		
		6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian umumnya	TW 4 = 3 Dokumen	TW 4 = 3 Dokumen	TW 4 = Rp. 35.920.000,00	TW 4 = Rp. 35.920.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
					TW 1 = 3 Orang	TW 1 = 2 Orang	TW 1 = Rp. 30.000.000,00	TW 1 = Rp. 25.000.000,00		
					TW 2 = 3 Orang	TW 2 = 2 Orang	TW 2 = Rp. 30.000.000,00	TW 2 = Rp. 25.000.000,00		
		7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan peralatan kantor	TW 3 = 6 Orang	TW 3 = 4 Orang	TW 3 = Rp. 60.000.000,00	TW 3 = Rp. 40.000.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
					TW 4 = 6 Orang	TW 4 = 4 Orang	TW 4 = Rp. 60.000.000,00	TW 4 = Rp. 55.000.000,00		
					TW 1 = 7 Sub Organisasi	TW 1 = 7 Sub Organisasi	TW 1 = Rp. 114.855.500,00	TW 1 = Rp. 54.721.700,00		
		8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Urusan Penunjang Bidang Keuangan	Jumlah Sub Organisasi yang ditunjang urusan pemerintahannya	TW 2 = 7 Sub Organisasi	TW 2 = 7 Sub Organisasi	TW 2 = Rp. 199.544.000,00	TW 2 = Rp. 154.377.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
					TW 3 = 7 Sub Organisasi	TW 3 = 7 Sub Organisasi	TW 3 = Rp. 273.770.500,00	TW 3 = Rp. 213.626.700,00		
					TW 4 = 7 Sub Organisasi	TW 4 = 7 Sub Organisasi	TW 4 = Rp. 369.117.000,00	TW 4 = Rp. 368.758.120,00		
		9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang dipelihara	TW 1 = 18 Unit	TW 1 = 0 Unit	TW 1 = Rp. 134.058.000,00	TW 1 = Rp. 0,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
					TW 2 = 18 Unit	TW 2 = 8 Unit	TW 2 = Rp. 134.058.000,00	TW 2 = Rp. 63.100.000,00		
					TW 3 = 18 Unit	TW 3 = 11 Unit	TW 3 = Rp. 134.058.000,00	TW 3 = Rp. 68.790.000,00		
		10. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan	TW 4 = 18 Unit	TW 4 = 18 Unit	TW 4 = Rp. 134.058.000,00	TW 4 = Rp. 134.058.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
TW 1 = 7 Sub Organisasi	TW 1 = 7 Sub Organisasi				TW 1 = Rp. 4.478.746.240,00	TW 1 = Rp. 3.101.397.907,00				
TW 2 = 7 Sub Organisasi	TW 2 = 7 Sub Organisasi				TW 2 = Rp. 8.947.629.780,00	TW 2 = Rp. 6.331.508.687,00				
11. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan	TW 3 = 7 Sub Organisasi	TW 3 = 7 Sub Organisasi	TW 3 = Rp. 13.416.100.820,00	TW 3 = Rp. 9.552.196.759,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian			
			TW 4 = 7 Sub Organisasi	TW 4 = 7 Sub Organisasi	TW 4 = Rp. 17.531.738.414,00	TW 4 = Rp. 12.659.929.982,00				
			TW 1 = 3 Jenis	TW 1 = 3 Jenis	TW 1 = Rp. 313.867.000,00	TW 1 = Rp. 74.526.570,00				
12. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang dipelihara	TW 2 = 3 Jenis	TW 2 = 3 Jenis	TW 2 = Rp. 381.717.000,00	TW 2 = Rp. 203.124.690,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian			
			TW 3 = 3 Jenis	TW 3 = 3 Jenis	TW 3 = Rp. 452.867.000,00	TW 3 = Rp. 405.834.750,00				
			TW 4 = 3 Jenis	TW 4 = 3 Jenis	TW 4 = Rp. 544.892.000,00	TW 4 = Rp. 532.473.650,00				
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	10. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan	TW 1 = 0 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar	TW 1 = Rp. 104.067.500,00	TW 1 = Rp. 0,00	Kasubbid Penyusunan Anggaran, Kasubbid Pembinaan Anggaran		
				TW 2 = 160 Eksemplar	TW 2 = 0 Eksemplar	TW 2 = Rp. 900.456.000,00	TW 2 = Rp. 410.090.472,00			
				TW 3 = 320 Eksemplar	TW 3 = 320 Eksemplar	TW 3 = Rp. 2.497.336.000,00	TW 3 = Rp. 1.243.253.172,00			
				Jumlah Buku APBD dan Buku Perubahan APBD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan	TW 4 = 320 Eksemplar	TW 4 = 320 Eksemplar	TW 4 = Rp. 2.683.666.000,00	TW 4 = Rp. 2.211.799.261,00	Kasubbid Penyusunan Anggaran, Kasubbid Pembinaan Anggaran
						TW 1 = 0 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar			
						TW 2 = 0 Eksemplar	TW 2 = 0 Eksemplar			
				Jumlah Buku Rancangan Anggaran PAD dan Buku Rancangan Anggaran Perubahan PAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan	TW 3 = 60 Eksemplar	TW 3 = 60 Eksemplar			Kasubbid Penatausahaan Pendapatan Daerah
						TW 4 = 120 Eksemplar	TW 4 = 120 Eksemplar			
						TW 1 = 0 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar			
11. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan	TW 2 = 0 Eksemplar	TW 2 = 0 Eksemplar			Kasubbid Penatausahaan Pendapatan Daerah			
			TW 3 = 100 Eksemplar	TW 3 = 50 Eksemplar						
			TW 4 = 100 Eksemplar	TW 4 = 100 Eksemplar						

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			11. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Persentase penerbitan SPD yang tepat waktu dan akurat	TW 1 = 100 %	TW 1 = 100 %	TW 1 = Rp. 224.550.500,00	TW 1 = Rp. 110.491.500,00	Kasubbid Pembinaan Anggaran
						TW 2 = 100 %	TW 2 = 100 %	TW 2 = Rp. 358.751.000,00	TW 2 = Rp. 215.959.264,00	
						TW 3 = 100 %	TW 3 = 100 %	TW 3 = Rp. 487.011.000,00	TW 3 = Rp. 311.272.764,00	
						TW 4 = 100 %	TW 4 = 100 %	TW 4 = Rp. 586.562.000,00	TW 4 = Rp. 516.344.855,00	
					Persentase penyerapan Dana Transfer	TW 1 = 25 %	TW 1 = 20,27 %			Kasubbid Dana Perimbangan
						TW 2 = 50 %	TW 2 = 51,02 %			
						TW 3 = 75 %	TW 3 = 72,55 %			
						TW 4 = 100 %	TW 4 = 97,95 %			
					Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan akurat	TW 1 = 100 %	TW 1 = 100 %			Kasubbid Belanja Pegawai
						TW 2 = 100 %	TW 2 = 100 %			
						TW 3 = 100 %	TW 3 = 100 %			
						TW 4 = 100 %	TW 4 = 100 %			
					Jumlah Laporan Kas Daerah	TW 1 = 15 Eksemplar	TW 1 = 15 Eksemplar			Kasubbid Pengendalian Kas Umum Daerah
						TW 2 = 30 Eksemplar	TW 2 = 30 Eksemplar			
						TW 3 = 45 Eksemplar	TW 3 = 45 Eksemplar			
						TW 4 = 60 Eksemplar	TW 4 = 60 Eksemplar			
					Jumlah Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat	TW 1 = 0 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar			Kasubbid Penatausahaan Pendapatan Daerah
						TW 2 = 0 Eksemplar	TW 2 = 0 Eksemplar			
						TW 3 = 0 Eksemplar	TW 3 = 0 Eksemplar			
						TW 4 = 50 Eksemplar	TW 4 = 50 Eksemplar			
					Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat	TW 1 = 100 %	TW 1 = 100 %			Kasubbid Belanja Non Pegawai
						TW 2 = 100 %	TW 2 = 100 %			
						TW 3 = 100 %	TW 3 = 100 %			
						TW 4 = 100 %	TW 4 = 100 %			
					Nilai Rata-Rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD	TW 1 = 0 Point	TW 1 = 0 Point			Kasubbid Pembinaan Anggaran
						TW 2 = 0 Point	TW 2 = 0 Point			
						TW 3 = 80 Point	TW 3 = 0 Point			
						TW 4 = 80 Point	TW 4 = 81 Point			
			12. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah Buku Laporan Keuangan Pemda	TW 1 = 0 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar	TW 1 = Rp. 353.009.900,00	TW 1 = Rp. 279.216.650,00	Kasubbid Akuntansi, Kasubbid Pengumpulan dan Analisis Data,
						TW 2 = 80 Eksemplar	TW 2 = 80 Eksemplar	TW 2 = Rp. 644.662.400,00	TW 2 = Rp. 557.159.650,00	
						TW 3 = 80 Eksemplar	TW 3 = 80 Eksemplar	TW 3 = Rp. 963.558.400,00	TW 3 = Rp. 700.228.650,00	
						TW 4 = 80 Eksemplar	TW 4 = 80 Eksemplar	TW 4 = Rp. 1.189.010.900,00	TW 4 = Rp. 1.096.929.150,00	
					Jumlah Buku Perda Realisasi APBD	TW 1 = 0 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar			Kasubbid Akuntansi, Kasubbid Pengumpulan dan Analisis Data,
						TW 2 = 110 Eksemplar	TW 2 = 110 Eksemplar			
						TW 3 = 110 Eksemplar	TW 3 = 110 Eksemplar			
						TW 4 = 110 Eksemplar	TW 4 = 110 Eksemplar			
					Jumlah Buku Laporan Keuangan SKPD	TW 1 = 0 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar			Kasubbid Akuntansi, Kasubbid Pengumpulan dan Analisis Data,
						TW 2 = 135 Eksemplar	TW 2 = 135 Eksemplar			
						TW 3 = 135 Eksemplar	TW 3 = 135 Eksemplar			
						TW 4 = 135 Eksemplar	TW 4 = 135 Eksemplar			
			13. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan	TW 1 = 25 %	TW 1 = 0,28 %	TW 1 = Rp. 792.812.065,00	TW 1 = Rp. 525.443.000,00	Kasubbag Keuangan
						TW 2 = 50 %	TW 2 = 37,52 %	TW 2 = Rp. 73.682.343.810,00	TW 2 = Rp. 22.024.184.000,00	
						TW 3 = 75 %	TW 3 = 78,59 %	TW 3 = Rp. 145.737.339.274,00	TW 3 = Rp. 144.195.038.200,00	
						TW 4 = 100 %	TW 4 = 98,82 %	TW 4 = Rp. 186.149.197.471,06	TW 4 = Rp. 183.949.883.100,00	
14. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya pengelolaan data berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu	TW 1 = 25 %	TW 1 = 25 %	TW 1 = Rp. 44.712.000,00	TW 1 = Rp. 0,00	Kasubbid Teknologi Informasi Keuangan Daerah			
			TW 2 = 50 %	TW 2 = 50 %	TW 2 = Rp. 87.085.000,00	TW 2 = Rp. 32.015.417,00				
			TW 3 = 75 %	TW 3 = 75 %	TW 3 = Rp. 161.825.000,00	TW 3 = Rp. 92.855.217,00				
			TW 4 = 100 %	TW 4 = 100 %	TW 4 = Rp. 267.734.000,00	TW 4 = Rp. 206.429.400,00				

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	15. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemda	TW 1 = 0 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar	TW 1 = Rp. 656.492.500,00	TW 1 = Rp. 166.519.000,00	Kasubbid Inventarisasi BMD, Kasubbid Pengendalian BMD, Kasubbid Penatausahaan BMD	
					TW 2 = 0 Eksemplar	TW 2 = 0 Eksemplar	TW 2 = Rp. 1.037.944.700,00	TW 2 = Rp. 633.592.400,00		
					TW 3 = 0 Eksemplar	TW 3 = 0 Eksemplar	TW 3 = Rp. 1.343.029.200,00	TW 3 = Rp. 1.153.815.066,00		
					TW 4 = 12 Eksemplar	TW 4 = 12 Eksemplar	TW 4 = Rp. 1.469.417.400,00	TW 4 = Rp. 1.458.804.572,00		
				Jumlah Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Pemda	TW 1 = 0 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar				Kasubbid Inventarisasi BMD, Kasubbid Pengendalian BMD, Kasubbid Penatausahaan BMD
					TW 2 = 0 Eksemplar	TW 2 = 0 Eksemplar				
					TW 3 = 0 Eksemplar	TW 3 = 0 Eksemplar				
					TW 4 = 12 Eksemplar	TW 4 = 12 Eksemplar				
	4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	16. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	Persentase Realisasi PAD	TW 1 = 25 %	TW 1 = 20,86 %	TW 1 = Rp. 426.227.500,00	TW 1 = Rp. 212.313.500,00	Kasubbid Pendapatan Asli Daerah	
					TW 2 = 50 %	TW 2 = 38,84 %	TW 2 = Rp. 885.159.500,00	TW 2 = Rp. 622.262.000,00		
					TW 3 = 75 %	TW 3 = 68,23 %	TW 3 = Rp. 1.083.993.300,00	TW 3 = Rp. 919.102.300,00		
					TW 4 = 100 %	TW 4 = 105,11 %	TW 4 = Rp. 1.654.452.200,00	TW 4 = Rp. 1.598.236.000,00		
			Persentase Realisasi PBB	TW 1 = 1 %	TW 1 = 3,48 %			Kasubbid Pendataan dan Penilaian, Kasubbid Pelayanan dan Pengalihan, Kasubbid Pengolahan		
				TW 2 = 5 %	TW 2 = 8,43 %					
				TW 3 = 75 %	TW 3 = 89,36 %					
				TW 4 = 100 %	TW 4 = 100,86 %					

EVALUASI RENCANA AKSI TINGKAT SUB KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERIODE 2018-2022
TAHUN 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TW 1 = 9 Dokumen TW 2 = 12 Dokumen TW 3 = 12 Dokumen TW 4 = 13 Dokumen	TW 1 = 9 Dokumen TW 2 = 12 Dokumen TW 3 = 12 Dokumen TW 4 = 13 Dokumen	TW 1 = Rp. 530.000,00 TW 2 = Rp. 975.000,00 TW 3 = Rp. 975.000,00 TW 4 = Rp. 1.365.000,00	TW 1 = Rp. 530.000,00 TW 2 = Rp. 975.000,00 TW 3 = Rp. 975.000,00 TW 4 = Rp. 1.365.000,00	Kasubbag Perencanaan	
				2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 0 Dokumen TW 3 = 1 Dokumen TW 4 = 2 Dokumen	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 0 Dokumen TW 3 = 1 Dokumen TW 4 = 2 Dokumen	TW 1 = Rp.0,00 TW 2 = Rp. 0,00 TW 3 = Rp. 850.000,00 TW 4 = Rp. 1.870.000,00	TW 1 = Rp.0,00 TW 2 = Rp. 0,00 TW 3 = Rp. 850.000,00 TW 4 = Rp. 1.870.000,00	Kasubbag Perencanaan	
				3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 1 Dokumen TW 3 = 1 Dokumen TW 4 = 2 Dokumen	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 1 Dokumen TW 3 = 1 Dokumen TW 4 = 2 Dokumen	TW 1 = Rp.0,00 TW 2 = Rp. 850.000,00 TW 3 = Rp. 850.000,00 TW 4 = Rp. 1.870.000,00	TW 1 = Rp.0,00 TW 2 = Rp. 850.000,00 TW 3 = Rp. 850.000,00 TW 4 = Rp. 1.870.000,00	Kasubbag Perencanaan	
				4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA	TW 1 = 1 Dokumen TW 2 = 1 Dokumen TW 3 = 1 Dokumen TW 4 = 1 Dokumen	TW 1 = 1 Dokumen TW 2 = 1 Dokumen TW 3 = 1 Dokumen TW 4 = 1 Dokumen	TW 1 = Rp. 1.870.000,00 TW 2 = Rp. 1.870.000,00 TW 3 = Rp. 1.870.000,00 TW 4 = Rp. 1.870.000,00	TW 1 = Rp. 1.870.000,00 TW 2 = Rp. 1.870.000,00 TW 3 = Rp. 1.870.000,00 TW 4 = Rp. 1.870.000,00	Kasubbag Perencanaan	
				5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 1 Dokumen TW 3 = 1 Dokumen TW 4 = 2 Dokumen	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 1 Dokumen TW 3 = 1 Dokumen TW 4 = 2 Dokumen	TW 1 = Rp.0,00 TW 2 = Rp. 850.000,00 TW 3 = Rp. 850.000,00 TW 4 = Rp. 1.870.000,00	TW 1 = Rp.0,00 TW 2 = Rp. 850.000,00 TW 3 = Rp. 850.000,00 TW 4 = Rp. 1.870.000,00	Kasubbag Perencanaan	
				6. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TW 1 = 3 Dokumen TW 2 = 6 Dokumen TW 3 = 9 Dokumen TW 4 = 12 Dokumen	TW 1 = 3 Dokumen TW 2 = 6 Dokumen TW 3 = 9 Dokumen TW 4 = 12 Dokumen	TW 1 = Rp. 3.557.500,00 TW 2 = Rp. 6.950.000,00 TW 3 = Rp. 10.507.500,00 TW 4 = Rp. 13.900.000,00	TW 1 = Rp. 2.925.000,00 TW 2 = Rp. 5.417.500,00 TW 3 = Rp. 8.725.000,00 TW 4 = Rp. 13.900.000,00	Kasubbag Keuangan	
				7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Laporan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Laporan Perangkat Daerah	TW 1 = 5 Dokumen TW 2 = 6 Dokumen TW 3 = 7 Dokumen TW 4 = 8 Dokumen	TW 1 = 5 Dokumen TW 2 = 6 Dokumen TW 3 = 7 Dokumen TW 4 = 8 Dokumen	TW 1 = Rp. 445.000,00 TW 2 = Rp. 755.000,00 TW 3 = Rp. 1.110.000,00 TW 4 = Rp. 1.465.000,00	TW 1 = Rp. 445.000,00 TW 2 = Rp. 755.000,00 TW 3 = Rp. 1.110.000,00 TW 4 = Rp. 1.465.000,00	Kasubbag Perencanaan	
				2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TW 1 = 3 Bulan TW 2 = 6 Bulan TW 3 = 9 Bulan TW 4 = 12 Bulan	TW 1 = 3 Bulan TW 2 = 6 Bulan TW 3 = 9 Bulan TW 4 = 12 Bulan	TW 1 = Rp. 1.027.104.479,00 TW 2 = Rp. 2.712.530.732,00 TW 3 = Rp. 3.721.871.372,00 TW 4 = Rp. 4.563.246.557,00	TW 1 = Rp. 822.309.861,00 TW 2 = Rp. 2.189.890.895,00 TW 3 = Rp. 3.156.391.171,00 TW 4 = Rp. 4.234.448.820,00	Kasubbag Keuangan
					9. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 0 Dokumen TW 3 = 0 Dokumen TW 4 = 1 Dokumen	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 0 Dokumen TW 3 = 0 Dokumen TW 4 = 1 Dokumen	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 0,00 TW 3 = Rp. 0,00 TW 4 = Rp. 1.055.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 0,00 TW 3 = Rp. 0,00 TW 4 = Rp. 1.055.000,00	Kasubbag Keuangan
					10. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 0 Dokumen TW 3 = 1 Dokumen TW 4 = 2 Dokumen	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 0 Dokumen TW 3 = 1 Dokumen TW 4 = 2 Dokumen	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 0,00 TW 3 = Rp. 605.000,00 TW 4 = Rp. 905.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 0,00 TW 3 = Rp. 605.000,00 TW 4 = Rp. 905.000,00	Kasubbag Keuangan
					11. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 1 Dokumen TW 3 = 1 Dokumen TW 4 = 1 Dokumen	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 0 Dokumen TW 3 = 1 Dokumen TW 4 = 1 Dokumen	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 1.055.000,00 TW 3 = Rp. 1.055.000,00 TW 4 = Rp. 1.055.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 0,00 TW 3 = Rp. 1.055.000,00 TW 4 = Rp. 1.055.000,00	Kasubbag Keuangan
				3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	TW 1 = 1 Dokumen TW 2 = 2 Dokumen TW 3 = 3 Dokumen TW 4 = 4 Dokumen	TW 1 = 1 Dokumen TW 2 = 2 Dokumen TW 3 = 3 Dokumen TW 4 = 4 Dokumen	TW 1 = Rp. 1.177.000,00 TW 2 = Rp. 2.027.000,00 TW 3 = Rp. 3.554.000,00 TW 4 = Rp. 4.904.000,00	TW 1 = Rp. 1.177.000,00 TW 2 = Rp. 2.027.000,00 TW 3 = Rp. 3.187.000,00 TW 4 = Rp. 4.904.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	13. Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen Laporan Pendapatan Daerah	TW 1 = 1 Dokumen TW 2 = 2 Dokumen TW 3 = 2 Dokumen TW 4 = 3 Dokumen	TW 1 = 1 Dokumen TW 2 = 2 Dokumen TW 3 = 2 Dokumen TW 4 = 3 Dokumen	TW 1 = Rp. 8.641.000,00 TW 2 = Rp. 17.312.000,00 TW 3 = Rp. 25.976.000,00 TW 4 = Rp. 35.920.000,00	TW 1 = Rp. 8.641.000,00 TW 2 = Rp. 17.312.000,00 TW 3 = Rp. 25.976.000,00 TW 4 = Rp. 35.920.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terakomodirnya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	TW 1 = 3 Orang TW 2 = 3 Orang TW 3 = 6 Orang TW 4 = 6 Orang	TW 1 = 2 Orang TW 2 = 2 Orang TW 3 = 4 Orang TW 4 = 6 Orang	TW 1 = Rp. 30.000.000,00 TW 2 = Rp. 30.000.000,00 TW 3 = Rp. 60.000.000,00 TW 4 = Rp. 60.000.000,00	TW 1 = Rp. 25.000.000,00 TW 2 = Rp. 25.000.000,00 TW 3 = Rp. 40.000.000,00 TW 4 = Rp. 55.000.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	15. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik	TW 1 = 5 Jenis TW 2 = 5 Jenis TW 3 = 5 Jenis TW 4 = 5 Jenis	TW 1 = 5 Jenis TW 2 = 5 Jenis TW 3 = 5 Jenis TW 4 = 5 Jenis	TW 1 = Rp. 5.983.000,00 TW 2 = Rp. 5.983.000,00 TW 3 = Rp. 5.983.000,00 TW 4 = Rp. 5.983.000,00	TW 1 = Rp. 5.983.000,00 TW 2 = Rp. 5.983.000,00 TW 3 = Rp. 5.983.000,00 TW 4 = Rp. 5.983.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				16. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	TW 1 = 10 Jenis TW 2 = 10 Jenis TW 3 = 10 Jenis TW 4 = 10 Jenis	TW 1 = 10 Jenis TW 2 = 10 Jenis TW 3 = 10 Jenis TW 4 = 10 Jenis	TW 1 = Rp. 34.213.500,00 TW 2 = Rp. 59.307.000,00 TW 3 = Rp. 84.628.500,00 TW 4 = Rp. 109.950.000,00	TW 1 = Rp. 34.213.500,00 TW 2 = Rp. 59.307.000,00 TW 3 = Rp. 84.628.500,00 TW 4 = Rp. 109.950.000,00	
				17. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan	Jumlah SKHU	TW 1 = 4 SKHU TW 2 = 4 SKHU TW 3 = 4 SKHU TW 4 = 4 SKHU	TW 1 = 4 SKHU TW 2 = 4 SKHU TW 3 = 4 SKHU TW 4 = 4 SKHU	TW 1 = Rp. 990.000,00 TW 2 = Rp. 1.980.000,00 TW 3 = Rp. 2.970.000,00 TW 4 = Rp. 3.960.000,00	TW 1 = Rp. 670.000,00 TW 2 = Rp. 1.585.000,00 TW 3 = Rp. 2.620.000,00 TW 4 = Rp. 3.960.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				18. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum tamu	Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu	TW 1 = 15 Kali TW 2 = 30 Kali TW 3 = 45 Kali TW 4 = 60 Kali	TW 1 = 15 Kali TW 2 = 25 Kali TW 3 = 40 Kali TW 4 = 60 Kali	TW 1 = Rp. 1.035.000,00 TW 2 = Rp. 2.070.000,00 TW 3 = Rp. 3.105.000,00 TW 4 = Rp. 4.140.000,00	TW 1 = Rp. 1.035.000,00 TW 2 = Rp. 1.725.000,00 TW 3 = Rp. 2.760.000,00 TW 4 = Rp. 4.140.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				19. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	TW 1 = 3 Bulan TW 2 = 6 Bulan TW 3 = 9 Bulan TW 4 = 12 Bulan	TW 1 = 3 Bulan TW 2 = 6 Bulan TW 3 = 9 Bulan TW 4 = 12 Bulan	TW 1 = Rp. 72.634.000,00 TW 2 = Rp. 130.204.000,00 TW 3 = Rp. 177.084.000,00 TW 4 = Rp. 245.084.000,00	TW 1 = Rp. 12.820.200,00 TW 2 = Rp. 85.777.000,00 TW 3 = Rp. 117.635.200,00 TW 4 = Rp. 244.725.120,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	TW 1 = 18 Unit TW 2 = 18 Unit TW 3 = 18 Unit TW 4 = 18 Unit	TW 1 = 0 Unit TW 2 = 8 Unit TW 3 = 11 Unit TW 4 = 18 Unit	TW 1 = Rp. 134.058.000,00 TW 2 = Rp. 134.058.000,00 TW 3 = Rp. 134.058.000,00 TW 4 = Rp. 134.058.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 63.100.000,00 TW 3 = Rp. 68.790.000,00 TW 4 = Rp. 134.058.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	TW 1 = 300 Surat TW 2 = 800 Surat TW 3 = 1.300 Surat TW 4 = 1.935 Surat	TW 1 = 755 Surat TW 2 = 1.270 Surat TW 3 = 3.010 Surat TW 4 = 4.562 Surat	TW 1 = Rp. 1.475.000,00 TW 2 = Rp. 2.450.000,00 TW 3 = Rp. 3.925.000,00 TW 4 = Rp. 4.900.000,00	TW 1 = Rp. 970.000,00 TW 2 = Rp. 2.345.000,00 TW 3 = Rp. 3.315.000,00 TW 4 = Rp. 4.893.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				22. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Telepon (Termasuk Speedy) 2 Rekening, Jumlah Rekening Air 1 Rekening, Jumlah	TW 1 = 7 Rekening TW 2 = 7 Rekening TW 3 = 7 Rekening TW 4 = 7 Rekening	TW 1 = 7 Rekening TW 2 = 7 Rekening TW 3 = 7 Rekening TW 4 = 7 Rekening	TW 1 = Rp. 25.837.500,00 TW 2 = Rp. 51.675.000,00 TW 3 = Rp. 77.512.500,00 TW 4 = Rp. 103.350.000,00	TW 1 = Rp. 12.835.312,00 TW 2 = Rp. 26.235.958,00 TW 3 = Rp. 39.088.238,00 TW 4 = Rp. 51.336.087,00	
				23. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Sub Organisasi yang ditunjang urusan pemerintahannya	TW 1 = 7 Sub Organisasi TW 2 = 7 Sub Organisasi TW 3 = 7 Sub Organisasi TW 4 = 7 Sub Organisasi	TW 1 = 7 Sub Organisasi TW 2 = 7 Sub Organisasi TW 3 = 7 Sub Organisasi TW 4 = 7 Sub Organisasi	TW 1 = Rp. 4.451.433.740,00 TW 2 = Rp. 8.893.504.780,00 TW 3 = Rp. 13.334.663.320,00 TW 4 = Rp. 17.423.488.414,00	TW 1 = Rp. 3.087.592.595,00 TW 2 = Rp. 6.302.927.729,00 TW 3 = Rp. 9.509.793.521,00 TW 4 = Rp. 12.603.700.895,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		24. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil Yang Dilaksanakan Pemeliharaan dan Perijinan 6 Unit, Jumlah Motor Yang Dilaksanakan Pemeliharaan dan Perijinan 26	TW 1 = 32 Unit	TW 1 = 32 Unit	TW 1 = Rp. 170.202.000,00	TW 1 = Rp. 64.661.570,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
						TW 2 = 32 Unit	TW 2 = 32 Unit	TW 2 = Rp. 219.652.000,00	TW 2 = Rp. 173.944.690,00		
						TW 3 = 32 Unit	TW 3 = 32 Unit	TW 3 = Rp. 278.102.000,00	TW 3 = Rp. 252.954.750,00		
			25. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara	TW 1 = 20 Unit	TW 1 = 5 Unit	TW 1 = Rp. 15.450.000,00	TW 1 = Rp. 1.650.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
						TW 2 = 30 Unit	TW 2 = 14 Unit	TW 2 = Rp. 24.700.000,00	TW 2 = Rp. 12.750.000,00		
						TW 3 = 40 Unit	TW 3 = 16 Unit	TW 3 = Rp. 31.625.000,00	TW 3 = Rp. 16.450.000,00		
						TW 4 = 43 Unit	TW 4 = 43 Unit	TW 4 = Rp. 34.725.000,00	TW 4 = Rp. 34.725.000,00		
			26. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	TW 1 = 10 Gedung	TW 1 = 10 Gedung	TW 1 = Rp. 128.215.000,00	TW 1 = Rp. 8.215.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
						TW 2 = 10 Gedung	TW 2 = 10 Gedung	TW 2 = Rp. 217.365.000,00	TW 2 = Rp. 16.430.000,00		
	TW 3 = 10 Gedung	TW 3 = 10 Gedung				TW 3 = Rp. 143.140.000,00	TW 3 = Rp. 136.430.000,00				
	2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	27. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	TW 1 = 0 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar	TW 1 = Rp. 16.905.000,00	TW 1 = Rp. 0,00	Kasubbid Penyusunan Anggaran	
						TW 2 = 160 Eksemplar	TW 2 = 0 Eksemplar	TW 2 = Rp. 147.284.000,00	TW 2 = Rp. 8.415.068,00		
						TW 3 = 160 Eksemplar	TW 3 = 160 Eksemplar	TW 3 = Rp. 149.684.000,00	TW 3 = Rp. 136.371.068,00		
			28. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS Perubahan Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan	TW 1 = 0 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar	TW 1 = Rp. 0,00	TW 1 = Rp. 0,00	Kasubbid Penyusunan Anggaran	
						TW 2 = 0 Eksemplar	TW 2 = 0 Eksemplar	TW 2 = Rp. 0,00	TW 2 = Rp. 0,00		
						TW 3 = 160 Eksemplar	TW 3 = 160 Eksemplar	TW 3 = Rp. 137.795.000,00	TW 3 = Rp. 84.030.500,00		
			29. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Rancangan APBD Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku APBD 60 Eksemplar, Jumlah Buku Penjabaran APBD 600 Eksemplar, Jumlah DPA OPD 1.760 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar	TW 1 = Rp. 1.500.000,00	TW 1 = Rp. 0,00	Kasubbid Penyusunan Anggaran	
						TW 2 = 1.760 Eksemplar	TW 2 = 1.760 Eksemplar	TW 2 = Rp. 322.100.000,00	TW 2 = Rp. 300.529.800,00		
						TW 3 = 2.420 Eksemplar	TW 3 = 1.760 Eksemplar	TW 3 = Rp. 755.910.000,00	TW 3 = Rp. 315.377.800,00		
			30. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Perubahan APBD 60 Eksemplar, Jumlah Buku Penjabaran Perubahan APBD 600 Eksemplar, Jumlah DPPA OPD 1.760 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar	TW 1 = Rp. 0,00	TW 1 = Rp. 0,00	Kasubbid Penyusunan Anggaran	
						TW 2 = 0 Eksemplar	TW 2 = 0 Eksemplar	TW 2 = Rp. 215.535.000,00	TW 2 = Rp. 63.063.604,00		
						TW 3 = 660 Eksemplar	TW 3 = 660 Eksemplar	TW 3 = Rp. 1.015.270.000,00	TW 3 = Rp. 567.870.804,00		
	31. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Buku Pedoman Penyusunan RKA SKPD 100 Eks, Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan APBD 100 Eks, Jumlah Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 100 Eks, Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Pokok-Pokok 132 Orang	TW 1 = 100 Eksemplar, 0 Orang	TW 1 = 0 Eksemplar, 0 Orang	TW 1 = Rp. 85.662.500,00	TW 1 = Rp. 0,00	Kasubbid Pembinaan Anggaran			
				TW 2 = 200 Eksemplar, 0 Orang	TW 2 = 0 Eksemplar, 0 Orang	TW 2 = Rp. 122.845.000,00	TW 2 = Rp. 0,00				
TW 3 = 300 Eksemplar, 0 Orang				TW 3 = 200 Eksemplar, 0 Orang	TW 3 = Rp. 259.355.000,00	TW 3 = Rp. 56.787.000,00					
TW 4 = 300 Eksemplar, 132 Orang				TW 4 = 200 Eksemplar, 0 Orang	TW 4 = Rp. 267.075.000,00	TW 4 = Rp. 125.604.000,00					
32. Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Tersusunnya Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Draft Rancangan Anggaran PAD 50 Eksemplar, Jumlah Buku Rancangan Anggaran PAD 50 Eksemplar, Jumlah Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD 50 Eksemplar, Jumlah Buku Rancangan Anggaran Perubahan PAD 50 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar	TW 1 = Rp. 0,00	TW 1 = Rp. 0,00	Kasubbid Penatausahaan Pendapatan Daerah				
			TW 2 = 0 Eksemplar	TW 2 = 0 Eksemplar	TW 2 = Rp. 92.692.000,00	TW 2 = Rp. 38.082.000,00					
			TW 3 = 200 Eksemplar	TW 3 = 100 Eksemplar	TW 3 = Rp. 179.322.000,00	TW 3 = Rp. 82.816.000,00					
			TW 4 = 200 Eksemplar	TW 4 = 200 Eksemplar	TW 4 = Rp. 179.322.000,00	TW 4 = Rp. 177.882.000,00					

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	33. Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya penerbitan SPD OPD	Jumlah OPD yang diterbitkan SPDnya	TW 1 = 44 OPD TW 2 = 44 OPD TW 3 = 44 OPD TW 4 = 44 OPD	TW 1 = 44 OPD TW 2 = 44 OPD TW 3 = 44 OPD TW 4 = 44 OPD	TW 1 = Rp. 3.354.000,00 TW 2 = Rp. 3.879.000,00 TW 3 = Rp. 5.018.500,00 TW 4 = Rp. 5.621.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 1.592.000,00 TW 3 = Rp. 1.592.000,00 TW 4 = Rp. 5.246.000,00	Kasubbid Pembinaan Anggaran
				34. Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terserapnya Dana Transfer untuk mendukung program pembangunan daerah	Persentase penyerapan Dana Transfer	TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 20,27 % TW 2 = 51,02 % TW 3 = 72,55 % TW 4 = 97,95 %	TW 1 = Rp. 29.548.000,00 TW 2 = Rp. 37.791.000,00 TW 3 = Rp. 50.361.000,00 TW 4 = Rp. 58.320.000,00	TW 1 = Rp. 10.986.000,00 TW 2 = Rp. 24.839.000,00 TW 3 = Rp. 35.097.000,00 TW 4 = Rp. 56.396.000,00	Kasubbid Dana Perimbangan
				35. Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank	Terlaksananya koordinasi, kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dalam rangka pembayaran gaji pegawai dengan Lembaga Keuangan Bank	Jumlah Daftar Gaji Bulanan, Jumlah BA Hasil Rekonsiliasi Data PNSD	TW 1 = 132 Eksemplar, 6 Eksemplar TW 2 = 264 Eksemplar, 12 Eksemplar TW 3 = 396 Eksemplar, 18 Eksemplar TW 4 = 528 Eksemplar, 0 Eksemplar	TW 1 = 132 Eksemplar, 6 Eksemplar TW 2 = 264 Eksemplar, 12 Eksemplar TW 3 = 396 Eksemplar, 18 Eksemplar TW 4 = 528 Eksemplar, 0 Eksemplar	TW 1 = Rp. 68.565.500,00 TW 2 = Rp. 130.376.000,00 TW 3 = Rp. 186.096.500,00 TW 4 = Rp. 231.079.000,00	TW 1 = Rp. 59.746.500,00 TW 2 = Rp. 107.252.000,00 TW 3 = Rp. 158.582.500,00 TW 4 = Rp. 214.131.000,00	Kasubbid Belanja Pegawai
				36. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran	Jumlah Laporan Kas Daerah	TW 1 = 15 Eksemplar TW 2 = 30 Eksemplar TW 3 = 45 Eksemplar TW 4 = 60 Eksemplar	TW 1 = 15 Eksemplar TW 2 = 30 Eksemplar TW 3 = 45 Eksemplar TW 4 = 60 Eksemplar	TW 1 = Rp. 57.240.000,00 TW 2 = Rp. 68.891.000,00 TW 3 = Rp. 76.334.000,00 TW 4 = Rp. 77.309.000,00	TW 1 = Rp. 3.796.000,00 TW 2 = Rp. 7.697.000,00 TW 3 = Rp. 14.390.000,00 TW 4 = Rp. 53.297.275,00	Kasubbid Pengendalian Kas Umum Daerah
				37. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Tersedianya data Piutang dan Utang Daerah Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 0 Eksemplar TW 3 = 0 Eksemplar TW 4 = 50 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 0 Eksemplar TW 3 = 0 Eksemplar TW 4 = 50 Eksemplar	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 3.000.000,00 TW 3 = Rp. 9.155.000,00 TW 4 = Rp. 32.885.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 0,00 TW 3 = Rp. 0,00 TW 4 = Rp. 32.885.000,00	Kasubbid Penatausahaan Pendapatan Daerah
				38. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya rekonsiliasi data Penerimaan dan Pengeluaran Kas terkait penerbitan SP2D	Jumlah BA Hasil Rekonsiliasi 60 eksemplar dan persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat 100%	TW 1 = 15 Eks, 100 % TW 2 = 30 Eks, 100 % TW 3 = 45 Eks, 100 % TW 4 = 60 Eks, 100 %	TW 1 = 15 Eks, 100 % TW 2 = 30 Eks, 100 % TW 3 = 45 Eks, 100 % TW 4 = 60 Eks, 100 %	TW 1 = Rp. 65.843.000,00 TW 2 = Rp. 111.921.000,00 TW 3 = Rp. 138.953.000,00 TW 4 = Rp. 160.255.000,00	TW 1 = Rp. 35.963.000,00 TW 2 = Rp. 74.579.264,00 TW 3 = Rp. 101.611.264,00 TW 4 = Rp. 135.075.764,00	Kasubbid Belanja Non Pegawai
				39. Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah	Nilai Rata-Rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD	TW 1 = 0 Point TW 2 = 0 Point TW 3 = 80 Point TW 4 = 80 Point	TW 1 = 0 Point TW 2 = 0 Point TW 3 = 0 Point TW 4 = 81 Point	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 2.893.000,00 TW 3 = Rp. 21.093.000,00 TW 4 = Rp. 21.093.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 0,00 TW 3 = Rp. 0,00 TW 4 = Rp. 19.313.816,00	Kasubbid Pembinaan Anggaran

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	40. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tertindakannya koordinasi pelaksanaan akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kertas Kerja Akuntansi Per Bulan	TW 1 = 45 Dokumen TW 2 = 45 Dokumen TW 3 = 45 Dokumen TW 4 = 45 Dokumen	TW 1 = 45 Dokumen TW 2 = 45 Dokumen TW 3 = 45 Dokumen TW 4 = 45 Dokumen	TW 1 = Rp. 20.092.400,00 TW 2 = Rp. 38.149.900,00 TW 3 = Rp. 55.081.900,00 TW 4 = Rp. 64.788.400,00	TW 1 = Rp. 20.092.400,00 TW 2 = Rp. 38.149.900,00 TW 3 = Rp. 49.960.900,00 TW 4 = Rp. 64.265.400,00	Kasubbid Akuntansi
				41. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tertindakannya rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Buku Laporan Bulanan Rekonsiliasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 540 Eks, Jumlah Buku Laporan Semester Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas 90 Eks, Jumlah Buku Laporan Triwulan Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Pendapatan LO dan Beban 180 Eks	TW 1 = 180 Eksemplar TW 2 = 405 Eksemplar TW 3 = 585 Eksemplar TW 4 = 810 Eksemplar	TW 1 = 180 Eksemplar TW 2 = 405 Eksemplar TW 3 = 585 Eksemplar TW 4 = 810 Eksemplar	TW 1 = Rp. 21.920.000,00 TW 2 = Rp. 53.063.000,00 TW 3 = Rp. 77.229.000,00 TW 4 = Rp. 105.506.000,00	TW 1 = Rp. 19.261.750,00 TW 2 = Rp. 52.928.750,00 TW 3 = Rp. 67.221.750,00 TW 4 = Rp. 105.482.650,00	Kasubbid Pelaporan
				42. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tertindakannya koordinasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Buku Laporan Realisasi APBD Per Semester 60 Eksemplar, Jumlah Laporan Realisasi APBD Bulanan 40 Eksemplar	TW 1 = 4 Eksemplar TW 2 = 16 Eksemplar TW 3 = 58 Eksemplar TW 4 = 100 Eksemplar	TW 1 = 4 Eksemplar TW 2 = 16 Eksemplar TW 3 = 58 Eksemplar TW 4 = 100 Eksemplar	TW 1 = Rp. 16.492.000,00 TW 2 = Rp. 41.824.000,00 TW 3 = Rp. 84.530.000,00 TW 4 = Rp. 127.570.000,00	TW 1 = Rp. 15.977.000,00 TW 2 = Rp. 32.749.000,00 TW 3 = Rp. 49.275.000,00 TW 4 = Rp. 111.783.000,00	Kasubbid Pelaporan
				43. Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tertindakannya konsolidasi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Draf LKPD 120 Eks, Jumlah Buku LKPD 80 Eks, Jumlah Buku Pidato Pengantar LKPD 50 Eks, Jumlah Draf LK SKPD135 Eks, Jumlah Buku LK SKPD 135 Eks, Jumlah Laporan Triwulan Dana TP dan UB 32 Eks, Jumlah Laporan Akhir Tahun Dana TP dan UB 12	TW 1 = 8 Eksemplar TW 2 = 271 Eksemplar TW 3 = 544 Eksemplar TW 4 = 564 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 271 Eksemplar TW 3 = 544 Eksemplar TW 4 = 564 Eksemplar	TW 1 = Rp. 168.691.000,00 TW 2 = Rp. 239.065.000,00 TW 3 = Rp. 281.830.000,00 TW 4 = Rp. 283.795.000,00	TW 1 = Rp. 120.589.000,00 TW 2 = Rp. 195.061.500,00 TW 3 = Rp. 221.456.500,00 TW 4 = Rp. 245.618.500,00	Kasubbid Akuntansi
				44. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tertindakannya koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Ranperda Realisasi APBD 80 Eks, Jumlah Buku Ranperbup Realisasi APBD 80 Eks, Jumlah Buku Perda Realisasi APBD 110 Eks, Jumlah Buku Perbup Realisasi APBD 110 Eks	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 160 Eksemplar TW 3 = 380 Eksemplar TW 4 = 380 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 160 Eksemplar TW 3 = 380 Eksemplar TW 4 = 380 Eksemplar	TW 1 = Rp. 87.013.500,00 TW 2 = Rp. 164.248.500,00 TW 3 = Rp. 233.144.500,00 TW 4 = Rp. 343.844.500,00	TW 1 = Rp. 68.785.500,00 TW 2 = Rp. 135.620.500,00 TW 3 = Rp. 206.966.500,00 TW 4 = Rp. 331.820.700,00	Kasubbid Pelaporan
				45. Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tertindakannya penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan atas Temuan BPK, Jumlah Dokumen Quisioner dalam Pemeriksaan BPK, Jumlah Dokumen Rencana Aksi atas Temuan Pemeriksaan BPK	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 0 Eksemplar TW 3 = 0 Eksemplar TW 4 = 9 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 0 Eksemplar TW 3 = 0 Eksemplar TW 4 = 9 Eksemplar	TW 1 = Rp. 6.059.000,00 TW 2 = Rp. 8.987.000,00 TW 3 = Rp. 17.487.000,00 TW 4 = Rp. 32.499.000,00	TW 1 = Rp. 6.059.000,00 TW 2 = Rp. 8.987.000,00 TW 3 = Rp. 8.987.000,00 TW 4 = Rp. 20.877.000,00	Kasubbid Pengumpulan dan Analisis Data
				46. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Tertindakannya koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Sidang Majelis TP TGR	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 0 Dokumen TW 3 = 0 Dokumen TW 4 = 6 Dokumen	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 0 Dokumen TW 3 = 0 Dokumen TW 4 = 6 Dokumen	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 14.372.000,00 TW 3 = Rp. 120.935.000,00 TW 4 = Rp. 120.935.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 13.010.000,00 TW 3 = Rp. 13.010.000,00 TW 4 = Rp. 119.823.900,00	Kasubbid Pengumpulan dan Analisis Data
				47. Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tertindakannya Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Analisis Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	TW 1 = 6 Eksemplar TW 2 = 12 Eksemplar TW 3 = 18 Eksemplar TW 4 = 24 Eksemplar	TW 1 = 6 Eksemplar TW 2 = 12 Eksemplar TW 3 = 18 Eksemplar TW 4 = 24 Eksemplar	TW 1 = Rp. 5.786.000,00 TW 2 = Rp. 13.992.000,00 TW 3 = Rp. 22.360.000,00 TW 4 = Rp. 30.612.000,00	TW 1 = Rp. 5.746.000,00 TW 2 = Rp. 13.942.000,00 TW 3 = Rp. 16.640.000,00 TW 4 = Rp. 30.547.000,00	Kasubbid Pengumpulan dan Analisis Data

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				48. Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Tertindaknya pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten	Jumlah Peserta Sosialisasi	TW 1 = 0 Orang TW 2 = 148 Orang TW 3 = 148 Orang TW 4 = 148 Orang	TW 1 = 0 Orang TW 2 = 148 Orang TW 3 = 148 Orang TW 4 = 148 Orang	TW 1 = Rp. 26.956.000,00 TW 2 = Rp. 70.961.000,00 TW 3 = Rp. 70.961.000,00 TW 4 = Rp. 79.461.000,00	TW 1 = Rp. 22.706.000,00 TW 2 = Rp. 66.711.000,00 TW 3 = Rp. 66.711.000,00 TW 4 = Rp. 66.711.000,00	Kasubbid Akuntansi
			4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	49. Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tertindaknya penyaluran Bantuan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan	TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 0,28 % TW 2 = 37,52 % TW 3 = 78,59 % TW 4 = 98,82 %	TW 1 = Rp. 792.812.065,00 TW 2 = Rp. 73.682.343.810,00 TW 3 = Rp. TW 4 = Rp. 186.149.197.471,06	TW 1 = Rp. 525.443.000,00 TW 2 = Rp. 22.024.184.000,00 TW 3 = Rp. TW 4 = Rp. 183.949.883.100,00	Kasubbag Keuangan
			5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	50. Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Tertindaknya implementasi dan pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi (perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan)	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu	TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = Rp. 44.712.000,00 TW 2 = Rp. 87.085.000,00 TW 3 = Rp. 161.825.000,00 TW 4 = Rp. 267.734.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 32.015.417,00 TW 3 = Rp. 124.870.634,00 TW 4 = Rp. 206.429.400,00	Kasubbid Teknologi Informasi Keuangan Daerah
		3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	51. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Tertindaknya Standar Satuan Harga Pemkab Lampung Barat	Jumlah buku Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 20 Eksemplar TW 3 = 20 Eksemplar TW 4 = 20 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 0 Eksemplar TW 3 = 20 Eksemplar TW 4 = 20 Eksemplar	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 66.148.500,00 TW 3 = Rp. 66.148.500,00 TW 4 = Rp. 66.148.500,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 0,00 TW 3 = Rp. 63.897.300,00 TW 4 = Rp. 65.277.300,00	Kasubbid Penatausahaan BMD
				52. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tertindaknya penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Input Data Barang Milik Daerah tepat waktu dan akurat	TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = Rp. 14.156.000,00 TW 2 = Rp. 174.509.000,00 TW 3 = Rp. 195.574.000,00 TW 4 = Rp. 195.574.000,00	TW 1 = Rp. 10.360.000,00 TW 2 = Rp. 103.371.000,00 TW 3 = Rp. 165.706.866,00 TW 4 = Rp. 194.576.866,00	Kasubbid Penatausahaan BMD
				53. Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tertindaknya inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah buku Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 45 Eksemplar TW 3 = 45 Eksemplar TW 4 = 45 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 45 Eksemplar TW 3 = 45 Eksemplar TW 4 = 45 Eksemplar	TW 1 = Rp. 198.583.000,00 TW 2 = Rp. 279.213.000,00 TW 3 = Rp. 295.405.000,00 TW 4 = Rp. 295.405.000,00	TW 1 = Rp. 49.836.000,00 TW 2 = Rp. 129.101.200,00 TW 3 = Rp. 265.931.200,00 TW 4 = Rp. 294.169.400,00	Kasubbid Inventarisasi BMD
				54. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Tertindaknya pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Plang Kepemilikan Tanah	TW 1 = 10 Unit TW 2 = 10 Unit TW 3 = 10 Unit TW 4 = 10 Unit	TW 1 = 10 Unit TW 2 = 10 Unit TW 3 = 10 Unit TW 4 = 10 Unit	TW 1 = Rp. 92.709.000,00 TW 2 = Rp. 92.709.000,00 TW 3 = Rp. 92.709.000,00 TW 4 = Rp. 92.709.000,00	TW 1 = Rp. 76.859.000,00 TW 2 = Rp. 84.059.000,00 TW 3 = Rp. 84.059.000,00 TW 4 = Rp. 92.709.000,00	Kasubbid Pengendalian BMD
				55. Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Tertindaknya penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	TW 1 = 48 Eksemplar TW 2 = 48 Eksemplar TW 3 = 48 Eksemplar TW 4 = 48 Eksemplar	TW 1 = 48 Eksemplar TW 2 = 48 Eksemplar TW 3 = 48 Eksemplar TW 4 = 48 Eksemplar	TW 1 = Rp. 211.781.000,00 TW 2 = Rp. 214.781.000,00 TW 3 = Rp. 414.781.000,00 TW 4 = Rp. 414.781.000,00	TW 1 = Rp. 9.590.000,00 TW 2 = Rp. 171.478.000,00 TW 3 = Rp. 381.460.000,00 TW 4 = Rp. 412.188.000,00	Kasubbid Pengendalian BMD
				56. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertindaknya pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terawasi dan terkendali	TW 1 = 100 % TW 2 = 100 % TW 3 = 100 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 100 % TW 2 = 100 % TW 3 = 100 % TW 4 = 100 %	TW 1 = Rp. 7.930.000,00 TW 2 = Rp. 21.560.000,00 TW 3 = Rp. 28.760.000,00 TW 4 = Rp. 35.960.000,00	TW 1 = Rp. 4.800.000,00 TW 2 = Rp. 16.505.000,00 TW 3 = Rp. 23.705.000,00 TW 4 = Rp. 35.960.000,00	Kasubbid Pengendalian BMD
				57. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tertindaknya optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah 100%, Persentase BMD Terhapus Dari DBMD Akibat Alasan Yang Sah (Pemindahtanganan, Keputusan Pengadilan, Peraturan Perundangan, dan Pemusnahan) Dari Usulan OPD 100%	TW 1 = 25 %, 25 % TW 2 = 50 %, 50 % TW 3 = 75 %, 75 % TW 4 = 100 %, 100 %	TW 1 = 10,65 %, 25 % TW 2 = 30,31 %, 50 % TW 3 = 39,39 %, 75 % TW 4 = 81,43 %, 100 %	TW 1 = Rp. 86.060.000,00 TW 2 = Rp. 86.060.000,00 TW 3 = Rp. 86.060.000,00 TW 4 = Rp. 121.060.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 26.114.000,00 TW 3 = Rp. 26.844.000,00 TW 4 = Rp. 117.664.000,00	Kasubbid Pengendalian BMD
				58. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tertindaknya rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Kertas Kerja Penyusunan Barang Pengguna	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 45 Eksemplar TW 3 = 45 Eksemplar TW 4 = 45 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 45 Eksemplar TW 3 = 45 Eksemplar TW 4 = 45 Eksemplar	TW 1 = Rp. 17.136.000,00 TW 2 = Rp. 45.935.000,00 TW 3 = Rp. 88.724.000,00 TW 4 = Rp. 128.490.000,00	TW 1 = Rp. 11.424.000,00 TW 2 = Rp. 45.935.000,00 TW 3 = Rp. 67.344.000,00 TW 4 = Rp. 126.970.106,00	Kasubbid Penatausahaan BMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				59. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah LBMD Pemda, Jumlah LBMD OPD, Jumlah DBMD Pemda	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 88 Eksemplar TW 3 = 88 Eksemplar TW 4 = 112 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 88 Eksemplar TW 3 = 88 Eksemplar TW 4 = 112 Eksemplar	TW 1 = Rp. 3.613.500,00 TW 2 = Rp. 27.030.200,00 TW 3 = Rp. 39.393.700,00 TW 4 = Rp. 63.960.900,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 27.030.200,00 TW 3 = Rp. 39.393.700,00 TW 4 = Rp. 63.960.900,00	Kasubbid Penatausahaan BMD		
				60. Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang Dibina	TW 1 = 44 OPD TW 2 = 44 OPD TW 3 = 44 OPD TW 4 = 44 OPD	TW 1 = 44 OPD TW 2 = 44 OPD TW 3 = 44 OPD TW 4 = 44 OPD	TW 1 = Rp. 24.524.000,00 TW 2 = Rp. 29.999.000,00 TW 3 = Rp. 35.474.000,00 TW 4 = Rp. 55.329.000,00	TW 1 = Rp. 3.650.000,00 TW 2 = Rp. 29.999.000,00 TW 3 = Rp. 35.474.000,00 TW 4 = Rp. 55.329.000,00	Kasubbid Penatausahaan BMD		
				4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	61. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tercapainya target PAD	Persentase Realisasi PAD	TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 20,86 % TW 2 = 38,84 % TW 3 = 68,23 % TW 4 = 105,11 %	TW 1 = Rp. 1.925.000,00 TW 2 = Rp. 21.033.000,00 TW 3 = Rp. 40.183.000,00 TW 4 = Rp. 77.881.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 16.805.000,00 TW 3 = Rp. 30.765.000,00 TW 4 = Rp. 77.439.000,00	Kasubbid Pendapatan Asli Daerah
						62. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah baliho, jumlah banner sosialisasi	TW 1 = 161 Buah TW 2 = 161 Buah TW 3 = 161 Buah TW 4 = 161 Buah	TW 1 = 161 Buah TW 2 = 161 Buah TW 3 = 161 Buah TW 4 = 161 Buah	TW 1 = Rp. 43.647.000,00 TW 2 = Rp. 67.767.000,00 TW 3 = Rp. 74.083.800,00 TW 4 = Rp. 97.333.800,00	TW 1 = Rp. 39.322.000,00 TW 2 = Rp. 65.892.000,00 TW 3 = Rp. 73.833.800,00 TW 4 = Rp. 97.083.800,00	Kasubbid Pendataan dan Penilaian
				63. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek PBB P2 yang dimutakhirkan	TW 1 = 0 Objek Pajak TW 2 = 10.000 Objek Pajak TW 3 = 10.000 Objek Pajak TW 4 = 10.000 Objek Pajak	TW 1 = 0 Objek Pajak TW 2 = 0 Objek Pajak TW 3 = 10.000 Objek Pajak TW 4 = 10.000 Objek Pajak	TW 1 = Rp. 9.580.000,00 TW 2 = Rp. 115.890.000,00 TW 3 = Rp. 140.360.000,00 TW 4 = Rp. 159.915.000,00	TW 1 = Rp. 9.522.000,00 TW 2 = Rp. 54.401.500,00 TW 3 = Rp. 103.874.000,00 TW 4 = Rp. 142.931.000,00	Kasubbid Pendataan dan Penilaian		
				64. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB P2 tersampaikan kepada seluruh wajib pajak 130.000 lembar, Persentase Data Objek Pajak masuk ke dalam Database SISMOP 100%	TW 1 = 130.000 Lembar, 0 % TW 2 = 130.000 Lembar, 0 % TW 3 = 130.000 Lembar, 0 % TW 4 = 130.000 Lembar, 100 %	TW 1 = 130.000 Lembar, 0 % TW 2 = 130.000 Lembar, 0 % TW 3 = 130.000 Lembar, 0 % TW 4 = 130.000 Lembar, 100 %	TW 1 = Rp. 293.358.500,00 TW 2 = Rp. 324.933.500,00 TW 3 = Rp. 351.413.500,00 TW 4 = Rp. 552.077.200,00	TW 1 = Rp. 113.547.500,00 TW 2 = Rp. 320.980.500,00 TW 3 = Rp. 334.960.500,00 TW 4 = Rp. 531.590.000,00	Kasubbid Pengolahan Data Informasi dan Penetapan		
				65. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksananya penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Realisasi PBB	TW 1 = 1 % TW 2 = 5 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 3,48 % TW 2 = 8,43 % TW 3 = 89,36 % TW 4 = 100,86 %	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 176.900.000,00 TW 3 = Rp. 176.900.000,00 TW 4 = Rp. 182.090.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 31.748.000,00 TW 3 = Rp. 163.072.000,00 TW 4 = Rp. 181.804.000,00	Kasubbid Pelayanan dan Penagihan		
				66. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tercapainya target PAD	Jumlah Feedback Laporan Bulanan 480 Eksemplar dan Jumlah Feedback Laporan Triwulan 160 Eksemplar, Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 100 %	TW 1 = 120 Eks, 0 Eks, 25 % TW 2 = 240 Eks, 40 Eks, 50 % TW 3 = 360 Eks, 80 Eks, 75 % TW 4 = 480 Eks, 160 Eks, 100 %	TW 1 = 120 Eks, 0 Eks, 15,48 % TW 2 = 240 Eks, 40 Eks, 33,83 % TW 3 = 360 Eks, 80 Eks, 68,90 % TW 4 = 480 Eks, 160 Eks, 97,85 %	TW 1 = Rp. 77.717.000,00 TW 2 = Rp. 157.132.000,00 TW 3 = Rp. 246.854.000,00 TW 4 = Rp. 367.464.000,00	TW 1 = Rp. 49.922.000,00 TW 2 = Rp. 116.070.000,00 TW 3 = Rp. 173.677.000,00 TW 4 = Rp. 351.770.000,00	Kasubbid Pendapatan Asli Daerah		
				67. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan Pajak Daerah	Jumlah Buku Laporan 170 Eksemplar, Persentase Realisasi PBB 100%	TW 1 = 0 Eks, 1 % TW 2 = 68 Eks, 5 % TW 3 = 119 Eks, 75 % TW 4 = 170 Eks, 100 %	TW 1 = 0 Eks, 3,48 % TW 2 = 68 Eks, 8,43 % TW 3 = 119 Eks, 89,36 % TW 4 = 170 Eks, 100,86 %	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 21.504.000,00 TW 3 = Rp. 54.199.000,00 TW 4 = Rp. 217.691.200,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 16.365.000,00 TW 3 = Rp. 38.920.000,00 TW 4 = Rp. 215.618.200,00	Kasubbid Pelayanan dan Penagihan		

ANALISIS CAPAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021

1. Analisis Capaian Program

BPKD Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran 2021 dapat melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dari 4 (empat) Program yang dilaksanakan oleh BPKD, semuanya berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator kinerjanya adalah Jumlah Bidang Urusan yang dilaksanakan, target 1 Bidang Urusan realisasi 1 Bidang Urusan.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, indikator kinerjanya antara lain :
 - a. Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, target 100 % realisasi 100 %.
 - b. Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, target 100 % realisasi 100 %.
 - c. Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan akurat, target 100 % realisasi 100 %.
 - d. Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat, target 100 % realisasi 100 %.
 - e. Persentase manajemen/pengelolaan kas daerah yang efektif dan efisien, target 100 % realisasi 100 %.
 - f. Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu, target 100 % realisasi 100 %.
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, indikator kinerjanya adalah Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat, target 100 % realisasi 100 %.
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, indikator kinerjanya antara lain :
 - a. Persentase Realisasi PAD, target 100 % realisasi 105,11 %.
 - b. Persentase Realisasi PBB, target 100 % realisasi 100,86 %.

2. Analisis Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2021, dilaksanakan berbagai Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan jumlah Program termasuk Program Rutin setelah Refocussing dan Perubahan APBD sebanyak 4 program, jumlah Kegiatan termasuk Kegiatan Rutin setelah Refocussing dan Perubahan APBD sebanyak 16 Kegiatan, dan jumlah Sub Kegiatan termasuk Sub Kegiatan Rutin setelah Refocussing dan Perubahan APBD sebanyak 67 Sub Kegiatan. Alokasi dana tahun 2021 sebesar Rp. 217.271.140.942,06 terealisasi sebesar Rp. 209.091.143.910,00 atau mencapai 96,24 %.

Dari 16 Kegiatan yang dilaksanakan, hampir semua dapat mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hanya ada 1 Kegiatan yang capaian kinerjanya tidak mencapai 100 %, yaitu :

1. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, indikator kinerjanya adalah Persentase penyaluran Bantuan Keuangan target 100 % realisasi 98,82 %. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 % disebabkan realisasi beberapa komponen Belanja tidak mencapai 100 %, di antaranya realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar 55,45 % dan realisasi Belanja Bagi Hasil sebesar 81,50 %. Realisasi Belanja Tidak Terduga sesuai dengan usulan OPD dan kondisi tanggap darurat yang harus dibiayai, sebagai catatan jumlah Belanja Tidak Terduga tetap harus dianggarkan dengan cukup sebagai langkah tanggap darurat untuk kondisi yang tidak dapat diprediksi. Sementara itu, realisasi Belanja Bagi Hasil sesuai dengan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada seluruh pekon berdasarkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan bulan Oktober 2021, dengan mempertimbangkan waktu pencairan yang tidak memungkinkan jika menunggu realisasi sampai dengan bulan Desember 2021, maka Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibayarkan kepada pekon adalah sampai dengan realisasi bulan Oktober 2021, kekurangan pembayaran bulan Nopember dan Desember 2021 akan dibayarkan pada TA. 2022 sebagai kurang bayar.

Dari 67 Sub Kegiatan, terdapat sebanyak 5 Sub Kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya belum mencapai 100 %, yaitu :

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, realisasi fisik/output antara lain Jumlah Buku Pedoman Penyusunan RKA SKPD 100 Eksemplar, Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan APBD 100 Eksemplar, Jumlah Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 0 Eksemplar, Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Pokok-Pokok 0 Orang. Jumlah Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah realisasi 0 Eksemplar disebabkan oleh penyusunan Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah baru pada tahap penyusunan Naskah Akademis, dan waktu tidak memungkinkan untuk pengesahan Perda. Karena Perda belum disahkan, maka Sosialisasi Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tidak dapat dilaksanakan, sehingga Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Pokok-Pokok 0 Orang.
2. Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, realisasi fisik/output sebesar 97,95 %. Realisasi fisik/output yaitu persentase penyerapan Dana Transfer hingga akhir tahun sebesar 97,95 %. Realisasi fisik tidak mencapai 100 % disebabkan oleh beberapa komponen Pendapatan Transfer tidak terealisasi 100 %, di antaranya realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar 95,69 %, realisasi Dana Alokasi Khusus Non Disik sebesar 97,88 %, dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar 74,43 %. Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik sesuai dengan realisasi pengeluaran/Belanja. Sementara itu, realisasi Bagi Hasil Pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditransfer oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada TA. 2021 yang baru sampai dengan Triwulan II 2021, kecuali Bagi Hasil Pajak Rokok yang ditransfer sampai dengan Triwulan III 2021.
3. Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, realisasi fisik/output sebesar 98,82 %. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 % disebabkan realisasi beberapa komponen Belanja tidak mencapai 100 %, di antaranya realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar 55,45 % dan realisasi Belanja Bagi Hasil sebesar 81,50 %. Realisasi Belanja Tidak

Terduga sesuai dengan usulan OPD dan kondisi tanggap darurat yang harus dibiayai, sebagai catatan jumlah Belanja Tidak Terduga tetap harus dianggarkan dengan cukup sebagai langkah tanggap darurat untuk kondisi yang tidak dapat diprediksi. Sementara itu, realisasi Belanja Bagi Hasil sesuai dengan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada seluruh pekon berdasarkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan bulan Oktober 2021, dengan mempertimbangkan waktu pencairan yang tidak memungkinkan jika menunggu realisasi sampai dengan bulan Desember 2021, maka Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibayarkan kepada pekon adalah s.d. realisasi bulan Oktober 2021, kekurangan pembayaran bulan Nopember dan Desember 2021 akan dibayarkan pada TA. 2022 sebagai kurang bayar.

4. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, realisasi fisik/output untuk indikator kinerja Persentase Realisasi Retribusi Daerah sebesar 81,43 %, sedangkan realisasi fisik/output untuk indikator kinerja Persentase Barang Milik Daerah Terhapus Dari Daftar Barang Milik Daerah Akibat Alasan Yang Sah (Pemindahtanganan, Keputusan Pengadilan, Peraturan Perundangan, dan Pemusnahan) dari Usulan OPD sebesar 100 %. Realisasi fisik/output indikator kinerja Persentase Realisasi Retribusi Daerah tidak mencapai 100 % dikarenakan belum tercapainya realisasi ideal Retribusi Daerah, khususnya Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Realisasi Retribusi Jasa Umum tidak mencapai target 100% disebabkan beberapa retribusi belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Pasar, sedangkan Realisasi Retribusi Jasa Usaha tidak mencapai target 100% disebabkan beberapa retribusi belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar, Retribusi Parkir, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Tidak tercapainya target beberapa komponen Retribusi Daerah tersebut disebabkan oleh diambilnya kebijakan stimulus Retribusi Daerah bagi para wajib Retribusi maupun masyarakat Lampung Barat yang terdampak Pandemi Covid-19.

5. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, realisasi fisik/output antara lain Jumlah Feedback Laporan Bulanan 480 Eksemplar dan Jumlah Feedback Laporan Triwulan 160 Eksemplar, Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 97,85 %. Indikator Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mencapai 100 % dikarenakan persentase realisasi Retribusi Daerah sebesar 81,43 % meskipun persentase realisasi Pajak Daerah mencapai 103,44 %. Penyebab tidak tercapainya target Retribusi Daerah adalah sebagaimana telah diuraikan pada point 4 di atas.